annual report 2020

Bank Palembang

PT.Bank Perkreditan Rakyat Palembang

PT BANK PERKRDITAN RAKYAT PALEMBANG
Jl. R. Sukamto No. 2 C-D Palembang

Bank Palembang

PT.Bank Perkreditan Rakyat Palembang

annual report 2020

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG



Kata **Pengantar**

Annual Report 2020 atau Laporan Keuangan Tahunan 2020 merupakan dokumen tahunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Annual Report bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang lebih dikhususkan sebagai dokumen pelaporan formal untuk kalangan terbatas. Oleh karena itu, sistematika dan materi yang disajikan juga relatif lebih dimaksudkan untuk mengikuti pola sistematika yang telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Secara konten, materi dan data pada buku ini lebih difokuskan pada pelaporan kinerja perusahaan dalam aspek kinerja keuangan. Data laporan keuangan yang disajikan pada bab tersendiri merupakan data-data hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik. Selain data kinerja keuangan, pada beberapa bab sebelumnya, disajikan pula gambaran umum perusahaan, beberapa pencapaian kinerja kualitatif seperti program-program pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan kebijakan strategis tentang pengembangan pasar dan jaringan.

Akhirnya, harus kami sampaikan bahwa penyusunan Annual Report 2020 ini tentu masih menyisakan beberapa kekurangan. Untuk itu, kami sangat terbuka dengan koreksi dan perbaikan konstruktif dari pihak-pihak terkait demi penyempurnaan penyusunan laporan serupa di masa mendatang.

Palembang, 17 Mei 2021
PT. BPR Palembang

Bank Palembang
PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang

SYAFRIL
Direktur Utama



Sambutan **Dewan Komisaris**

Mencermati data-data kinerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang sebagaimana disajikan pada Annual Report 2020, tergambar jelas dedikasi & optimisme segenap jajaran manajemen dalam mengelola perseroan. Kami percaya, seluruh kebijakan manajemen sepanjang tahun 2020 lalu telah berada pada jalur yang tepat. Satu hal yang layak diapresiasi adalah bahwa secara umum, beberapa aspek mengalami peningkatan kinerja yang cukup signifikan.

Sepanjang tahun 2020 pertumbuhan aset mengalami kenaikan sebesar 7,84 persen yaitu menjadi Rp.86.176.372 ribu dibandingkan dengan posisi aset pada tahun 2019 sebesar Rp.79.914.338 ribu. Sepanjang tahun 2020 PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang berhasil memperoleh laba sebesar Rp.569.050 ribu, sedangkan tahun 2019 PT BPR Palembang mengalami kerugian sebesar -Rp.462.592 ribu.

Harus diakui, BPR kini harus bersaing ketat dan berbagi pasar dengan Bank Umum yang sudah memiliki unit-unit ritel di sektor UMKM. Di tengah persaingan yang nampak tidak seimbang ini, BPR tidak punya pilihan lain selain melakukan upaya sungguh-sungguh dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang meliputi asas-asas: (1) *transparancy*, (2) *accountability*, (3) *responsibility*, (4) *independency*, dan (5) *fairness*.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan dan menjalin kerja sama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Apresiasi kami sampaikan juga kepada Direksi & segenap staff, yang telah bekerja secara maksimal sepanjang tahun 2020.

Palembang, 17 Mei 2021
PT. BPR Palembang

Bank Palembang
PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang

Drs. H. A. Wahid Syukur
Komisaris Utama

Daftar **ISI**

KATA PENGANTAR i
SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS ii
DAFTAR ISI iii
VISI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG..... v
MISI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG..... vi

Bagian Kesatu

PENDAHULUAN

1. Sejarah Pendirian Perusahaan 1
2. Perizinan Usaha 2
3. Bidang Usaha 2
4. Kedudukan dan Pusat Operasi..... 3
5. Susunan dan Profil Pengurus..... 4
6. Profil Pejabat Eksekutif 6
7. Kepemilikan 8
8. Struktur Organisasi 9

Bagian Kedua

LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA

1. Kinerja Keuangan 2019 10
   a Pertumbuhan Total Aset 10
   b. Pertumbuhan Pendapatan 11
   c. Beban Operasional 12
   d. Laba (Rugi) Usaha..... 14
2. Rasio-Rasio Keuangan 14
3. Penanganan Kredit Bermasalah..... 15

Bagian Ketiga

LAPORAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN

1. Aktivitas Utama 20
   a. Penghimpunan Dana 20
      1). Tabungan 20
      2). Deposito Berjangka 21
      3). Antarbank Passiva 21
   b. Penyaluran Dana 21

Bagian Keempat

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN

1. Kebijakan-kebijakan Perusahaan 23
a. Penguatan Institusi Internal 23
b. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Termasuk Bonus, Tantiem dan Fasilitas Lain..... 24
c. Pengembangan Jaringan Pemasaran 24
d. Peningkatan Kualitas SDM 24
e. Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Teknologi Informasi..... 26
f. Penguatan Jaringan dan Kerjasama Eksternal 27
2. Implementasi Manajemen Risiko 28
a. Risiko Kredit 28
b. Risiko Likuiditas 28
c. Risiko Operasional 28
d. Risiko Kepatuhan..... 28
3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 28
4. Perubahan Penting Lain yang Terjadi di BPR yang Mempengaruhi Operasional BPR 30
5. Corporate Social Responsibility (CSR) 30

Bagian Kelima

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Audit Independen 32
2. Neraca 39
3. Laporan Laba Rugi 41
4. Laporan Perubahan Ekuitas 42
5. Laporan Arus Kas 43
6. Catatan-Catatan Atas Laporan Keuangan..... 44

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Kualitas Aktiva Produktif
Lampiran 2 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
Lampiran 3 Capital Adequacy Ratio
Lampiran 4 Loan to Deposit Rasio
Lampiran 5 Cash Ratio
Lampiran 6 Rasio Return on Aset dan BOPO

Visi **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG**

“Menjadi BPR yang sehat dan kuat serta tumbuh dan berkembang pesat”

Misi **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG**

- Menghimpun dana pihak ketiga sebagai sumber dana untuk membiayai operasional BPR.
- Memperkuat permodalan BPR yang berasal dari laba usaha maupun yang berasal dari setoran modal.
- Menyalurkan kredit sesuai dengan rencana kerja dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- Menjaga kualitas aktiva produktif agar tetap memiliki aktiva produktif yang sehat.
- Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada SDM sehingga memiliki SDM yang professional, jujur dan berintegritas tinggi.
- Memahami risiko perbankan dan mengendalikan resiko tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
- Mematuhi peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Bagian Kesatu

Pendahuluan

1. Sejarah Pendirian Perusahaan

Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat disingkat PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat atau disingkat / disebut BANK PASAR yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yaitu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor : 14 tanggal 08 April 2013 dihadapan Notaris Ny. Siti Hikmah Nuraini, SH dan telah mendapat pengesahaan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28879.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 29 Mei 2013.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain :

- Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 01 tanggal 05 Oktober 2017 tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat telah mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0021188.AH.01.02 tanggal 12 Oktober 2017.
- Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 01, tanggal 1 November 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0262222 pada tanggal 09 November 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, sehingga modal disetor PT Bank Perkreditan Rakyat berubah menjadi Rp.38.000.000 ribu dari sebelumnya sebesar Rp.25.000.000 ribu.
- Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 34 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pernyataan Keputusan secara Sirkuler para Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang yang diantara keputusan dari para Pemegang Saham yaitu mengesahkan dan mengangkat Bapak Syafril sebagai Direktur Utama Perseroan.

- Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 7 tanggal 11 Mei 2020 tentang Akta Pernyataan secara Sirkuler para Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0241356 pada tanggal 09 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan nomor AHU-AH.01.03-0241359 pada tanggal 09 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Salah satu keputusan di dalam Akta No. 7 tersebut yaitu terjadi pengalihan kepemilikan saham yang dimiliki Ir. Ahmad Syafriar kepada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya sebanyak 600 lembar saham atau nominal Rp. 60 juta.
- Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 01 tanggal 06 Januari 2021 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa PT BPR Palembang dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0063565 pada tanggal 01 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan nomor AHU-AH.01.03-0063566 pada tanggal 01 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Dalam Akta tersebut, terkait masa jabatan Pengurus maka RUPS Luar Biasa memutuskan untuk memberhentian dan mengangkat kembali Pengurus yang habis masa jabatannya (perpanjangan masa jabatan).

2. Perizinan usaha

PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang mulai beroperasi pada tanggal 18 Januari 2016 dan dalam menjalankan usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang memiliki perizinan usaha sebagai berikut :

a. Surat Izin Prinsip dari Bank Indonesia tanggal 26 Maret 2013 dengan Nomor 15/83/DKBU.
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang dengan nomor 060616408814 tertanggal 6 Januari 2016, masa berlaku hingga 6 Januari 2021.
c. Surat Izin Gangguan No: 503/IG.R/7451/BPM-PTSP/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 07 Desember 2015.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur, dengan Nomor NPWP: 02.298.251.4-301.000.
e. Izin Usaha dari Otoritas Jasa keuangan NOMOR KEP-85/d.03/2015.
f. Izin Perubahan Nama BPR dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-56/KR.07/2017.

3. Bidang Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang Bank Perkreditan Rakyat dengan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

4. Kedudukan dan Pusat Operasional

Perseroan berdomisili di Palembang dengan alamat Jl. R. Sukamto No. 2 C-D, RT.042 RW. 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang 30114, Sumatera Selatan, Indonesia dan belum memiliki Kantor Cabang maupun Kantor Kas.

Kontak yang dapat dihubungi melalui :

No. Telp. : (0711) 5630086 / 5630092
Website : bankbprpalembang.com
email : bprpalembang@bankbprpalembang.com

5. Susunan dan Profil Pengurus

a. **Drs. H. Abdul Wahid Syukur :** Komisaris Utama



Lahir di Bintuhan, Bengkulu 19 Januari 1948, saat ini tinggal di Palembang. Beliau adalah Alumni Doktorandus Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 1986. Beliau telah menyelesaikan sertifikasi sebagai Komisaris pada tanggal 30 Mei 2016 yang dilanjutkan dengan survailen pada tanggal 27 November - 07 Desember 2019. Pensiunan ASN Kota Palembang ini, lama berkarier pada Inspektorat Kota Palembang dengan jabatan terakhir sebagai Inspektur. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dari tahun2006 sampai dengan tahun 2013.

b. **Drs. H. Sumirin T. Tjinto** : Komisaris



Lahir di Tanjung Sakti, 16 April pada tahun 1952. Beliau adalah Doktorandus Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 1988. Beliau telah menyelesaikan sertifikasi sebagai Komisaris pada tahun 2016. Selain menjabat komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, beliau juga merupakan Direktur Keuangan pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Karir pada dunia perbankan telah dimulainya sejak tahun 1974 di Bank Sumsel Babel dengan jabatan terakhir sebagai Direktur I pada tahun 1997-2001 dan Pjs. Direktur Utama pada tahun 1999.

c. **Syafril** : Direktur Utama



Lahir di Padang Panjang, 29 Maret 1967. Menempuh studi Administrasi Negara di STIA BNM Pariaman pada tahun 2005 dengan gelar Sarjana Sosial. Beliau telah lulus Sertifikasi Direksi BPR sejak tahun 2005. Karir dalam dunia perbankan dimulai sejak tahun 1990 pada PT BPR Rangkiang Nagari, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat dengan berbagai posisi jabatan. Bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang sejak tanggal 13 Desember 2019 dengan jabatan sebagai Direktur Utama.

d. **Slamet** : Direktur



Lahir di Musuk, 14 Mei 1969. Menempuh studi ekonomi pada Universitas Widya Gama Malang tahun 1996 dan lulus Sertifikasi Direksi BPR pada tahun 2011. Pengalaman dalam dunia perbankan ditekuninya sejak tahun 2008 sebagai Kepala Bagian Marketing pada BPR Tunas Jaya Graha Lampung. Bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang sejak tahun 2013 dengan jabatan sebagai Direktur.

6. Profil Pejabat eksekutif

a **Eko Karnain** : Manager Operasional



Lahir di Bailangu, 18 Maret 1981, saat ini tinggal di Palembang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Sriwijaya dengan jurusan Akuntansi pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang pernah menjadi Internal Control Unit pada Bank Yudha Bhakti KC Palembang dari tahun 2007 hingga tahun 2010 dan kemudian sebagai Auditor pada tahun 2010 s/d 2013.

b **Ratih Puspa Dewi :** Manager Credit Support



Lahir di Jambi pada tanggal 02 November 1983. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang, pernah bekerja pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya pada bagian Business Development, kemudian dilanjutkan pada PT. Pembangkit Listrik Palembang Jaya sebagai Manager Administrasi dan Keuangan.

c **Alfanni Chondri Dopong :** Manager Kredit Produktif



Lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 13 Juni 1980. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, pernah menjabat sebagai Branch Manager pada Bank BTPN pada rentang waktu antara tahun 2011–2014, 2015-2017, dan sebagai Area Manager pada tahun 2014-2015.

d. Belly Guntur Putra : Manager Kredit Konsumtif



Lahir di Palembang pada tanggal 11 Desember 1984. Berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2008 di Universitas Sriwijaya. Sebelum bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, pernah bekerja pada Bank Mandiri sebagai Mikro Kredit Sales pada tahun 2009 s/d 2011. Selanjutnya pada tahun 2011 s/d 2013 bekerja sebagai Account Officer Ritel pada Bank BRI. Pengalaman di bidang perbankan berikutnya pernah bergabung dengan PT. Bank Sinarmas pada tahun 2013 sebagai Marketing Officer Micro Small Medium Enterprise (MSME).

e. Dani Aminudin : Manager SDM – Umum dan Informasi Teknologi



Lahir di Palembang pada tanggal 22 april 1975, merupakan anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara. Menyelesaikan pendidikan pada Universitas Gunadarma Jakarta pada tahun 1997 dengan jurusan Sistem Informasi. Pengalaman bekerja di bidang informasi teknologi dimulai dari tahun 2001 hingga bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang pada tahun 2013.

d. Chris Purwanto : PE Audit Intern



Lahir di Lahat / Batu Rancing pada tanggal 06 Maret 1979. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, pernah bekerja pada PT. Federal International Finance sebagai CR Field dari tahun 2006 s/d 2014 dan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya pada bagian Satuan Pengawasan Intern pada tahun 2014 s/d 2015.

f. Orita : PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Petugas Khusus APU & PPT



Lahir di Palembang pada 27 Oktober 1989. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2012 dari Universitas Sriwijaya. Pengalaman di perbankan dimulai pada tahun 2012 s/d 2015 di Bank Sinarmas di bagian SKAI. Selanjutnya pada tahun 2015 s/d 2017 bekerja sebagai Broker dan Staff SDM pada PT Valbury Securitas. Hingga pada tahun 2017 – sekarang bergabung di PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang sebagai PE Manajemen Risiko.

7. Kepemilikan

Modal dasar Perseroan pada saat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 14 tanggal 8 April 2013 dihadapan Notaris Ny. Siti Hikmah Nuraini, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-28879.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 29 Mei 2013 adalah sebesar Rp.24.000.000.000,- Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor sebesar 25% atau sejumlah Rp.6.000.000.000,- yang terbagi atas 99,00% dimiliki oleh PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dan 1,00% dimiliki oleh Ir. Ahmad Syafriar. Modal Dasar dan Modal Disetor Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut:

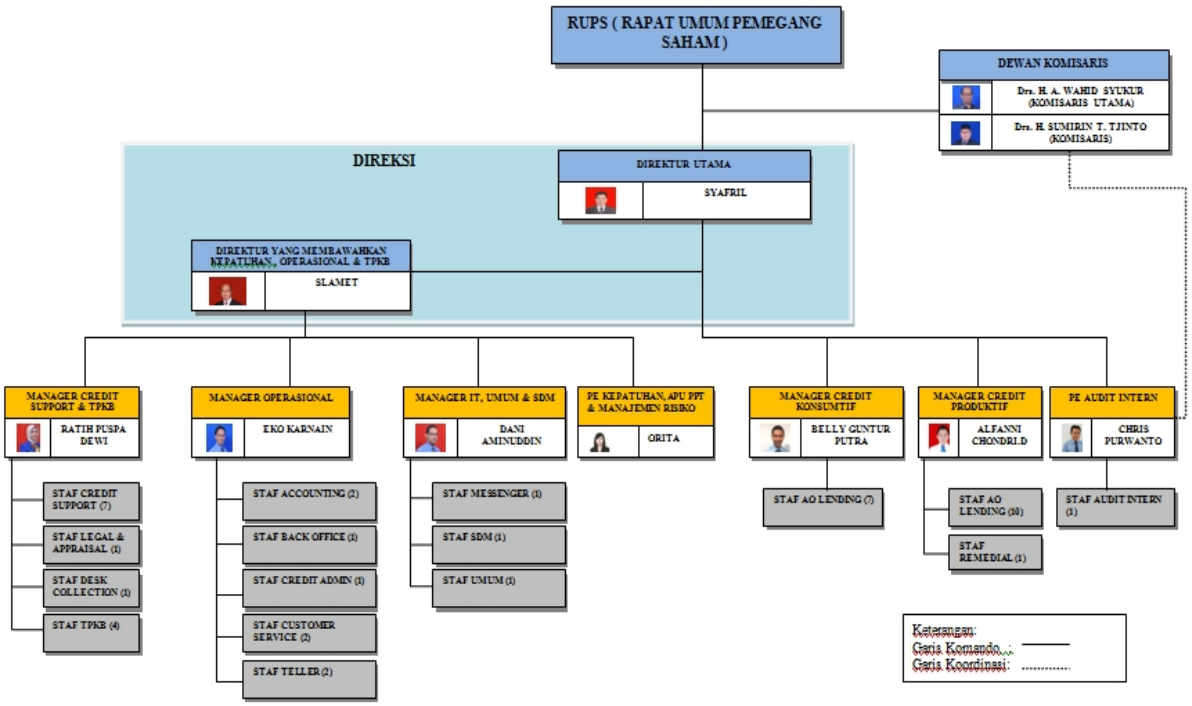
No.	Tanggal Efektif	Modal Dasar Perseroan	Modal Disetor
1.	08 April 2013	Rp. 24.000.000.000,-	Rp. 6.000.000.000,-
2.	27 Mei 2016	Rp. 24.000.000.000,-	Rp. 12.000.000.000,-
3.	05 Desember 2016	Rp. 100.000.000.000,-	Rp. 25.000.000.000,-
4.	27 November 2018	Rp. 100.000.000.000,-	Rp. 38.000.000.000,-

Perubahan modal dasar Perseroan dari Rp.24.000.000.000,- menjadi Rp.100.000.000.000,- dan penambahan setoran modal dari Rp.25.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.38.000.000.000,- telah disahkan melalui Akta No. 1 tanggal 1 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Siti Hikmah Nurani, SH. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0262222 pada tanggal 9 November 2018.

Susunan Pemegang Saham dan Komposisi Pemegang Saham posisi 31 Desember 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Saham	Jumlah Saham (Rp)
1.	Pemerintah Kota Palembang	260.000 lembar	68,42	Rp. 26.000.000.000,-
2.	PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya	120.000 lembar	31,58	Rp. 12.000.000.000,-
TOTAL		**380.000 lembar**	**100,00**	**Rp. 38.000.000.000,-**

8. Struktur Organisasi



SK Direksi 13/SK-Dir/BPR-PLG/IX/2020 menetapkan Struktur Organisasi yang berlaku hingga 31 Desember 2020. Perubahan Struktur Organisasi ditujukan untuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah. Di dalam Struktur Organisasi ini, dibentuk satuan kerja baru yaitu Tim Penyelesaian Kredit Bermasalah (TPKB) yang diketuai oleh Direktur BPR Palembang dengan 9 (sembilan) anggota dari Credit Support, Remedial dan Account Officer. TPKB dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 011/BPR-BP/KEP/XI/2020 tanggal 5 November 2020.

Adapun tugas dari TPKB adalah sebagai berikut :

1. Melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah.
2. Membuat laporan setiap bulan untuk penyelesaian kredit bermasalah.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan eksternal maupun prosedur internal yang berlaku (SOP Penyelesaian Kredit Bermasalah).
4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan.
5. Melakukan tugas dan tanggung jawab serta hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah

Bagian Kedua

Laporan Perkembangan Usaha

1. Kinerja Keuangan Tahun 2020

Perkembangan kinerja operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang diukur dari kinerja keuangannya menunjukan kondisi kinerja yang meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2020, total aset PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang adalah sebesar Rp.86.176.372 ribu dan laba yang berhasil dicapai selama tahun 2020 sebesar Rp.569.050 ribu. Secara kumulatif saldo laba (rugi) di neraca posisi 31 Desember 2020 masih tercatat rugi sebesar Rp.4.462.281 ribu. Saldo rugi tersebut terjadi sebagian besar karena adanya kerugian yang dialami pada tahun 2016 sebesar Rp.5.986.094 ribu. Kerugian tersebut terjadi akibat pembebanan biaya-biaya pra-operasional (biaya pendirian) sejak tahun 2009 s/d Desember 2015 yang harus dibebankan sekaligus pada tahun pertama operasional dan tidak boleh ditangguhkan sehingga biaya pra-operasional (biaya pendirian) dibebankan pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang efektif beroperasi.

a. Pertumbuhan Aset

Total aset yang berhasil dicapai pada tahun 2020 dibandingkan dengan pencapaian aset pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.6.262.034 ribu atau naik sebesar 7,84 persen. Pada 31 Desember 2020 aset tercatat sebesar Rp.86.176.372 ribu sedangkan pada 31 Desember 2019 aset tercatat sebesar Rp.79.914.338 ribu.

b. Pertumbuhan Pendapatan

1) Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang terdiri dari pendapatan bunga antar bank aktiva (tabungan, giro dan deposito) dan pendapatan bunga kredit. Pada posisi 31 Desember 2020 pendapatan bunga tercatat sebesar Rp.13.306.856 ribu yang terdiri dari pendapatan bunga tabungan sebesar Rp.40.250 ribu, jasa giro sebesar Rp.281.108 ribu, pendapatan bunga deposito sebesar Rp.1.870.195 ribu dan pendapatan bunga kredit sebesar Rp.11.115.304 ribu. Sedangkan posisi 31 Desember 2019 pendapatan bunga yang berhasil dicapai sebesar Rp.11.275.875 ribu sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp.2.030.982 ribu atau 18,01 persen.

2) Pendapatan Provisi & Administrasi

Total pendapatan provisi dan administrasi kredit tahun 2020 adalah sebesar Rp.882.277 ribu. Sedangkan tahun 2019 pendapatan provisi dan administrasi kredit sebesar Rp.812.801 ribu sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp.69.476 ribu atau 8,55 persen.

3) Biaya Transaksi

Total biaya transaksi tahun 2020 adalah sebesar Rp.335.132 ribu sedangkan biaya transaksi tahun 2019 adalah sebesar Rp.91.587 ribu sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp.243.545 ribu atau 265,92 persen. Biaya transaksi tersebut merupakan biaya transaksi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari fee rekomendasi dan fee *collection* bendahara pemotong gaji untuk kredit ASN dan Kredit Multi Guna.

4) Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.791.490 ribu yang terdiri dari pendapatan pemulihan penyisihan penghapusan aktiva produktif sebesar Rp.394.018 ribu dan pendapatan lainnya yaitu sebesar Rp.397.471 ribu. Sebagai perbandingan pada posisi 31 Desember 2019 PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang membukukan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp.1.362.656 ribu sehingga terjadi penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar -Rp.571.167 ribu atau -41,92 persen.

5) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional tahun 2020 yang diperoleh sebesar Rp.30.154 ribu sedangkan pendapatan non operasional lainnya tahun 2019 sebesar Rp.23.393 ribu sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp.6.761 ribu atau 28,90 persen.

Ringkasan Kinerja Keuangan 2020 vs 2019

dalam ribuan rupiah

URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
Total Aset	86,176,372	79,914,338
Dana Pihak Ketiga	35,850,984	33,253,984
Kredit Yang Diberikan	59,825,581	59,491,122
NPL	18.70%	18.11%
Modal Disetor	38,000,000	38,000,000
Total Pendapatan	14,675,646	13,383,139
Total Biaya	14,106,596	13,845,730
Laba (Rugi) Tahunan	569,050	(462,592)

c. Beban Operasional

1) Beban Bunga

Beban bunga yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.4.767.661 ribu sedangkan beban bunga tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.374.207 ribu sehingga terjadi kenaikan beban bunga sebesar Rp.393.454 ribu atau 8,99 persen. Beban bunga tahun 2020 sebesar Rp.4.767.661 ribu terdiri atas beban bunga tabungan sebesar Rp.272.768 ribu, beban bunga deposito sebesar Rp.2.971.226 ribu, beban bunga simpanan dari bank lain sebesar Rp.1.357.353 ribu dan beban premi penjaminan LPS sebesar Rp.124.993 ribu ditambah biaya transaksi sebesar Rp.41.320 ribu.

2) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Beban penyisihan penghapusan aset produktif (beban PPAP) pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.676.046 ribu yang terdiri dari beban PPAP penempatan pada bank lain sebesar Rp.75.937 ribu dan beban PPAP kredit sebesar Rp.1.600.109 ribu. Sedangkan pada tahun 2019 beban PPAP sebesar Rp.3.326.948 ribu sehingga terjadi penurunan beban PPAP sebesar -Rp.1.650.902 ribu atau -49,62 persen.

3) Beban Tenaga Kerja

Beban tenaga kerja yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.5.631.986 ribu, yang terdiri dari biaya gaji dan upah sebesar Rp.3.996.807 ribu, honorarium dewan komisaris sebesar Rp.747.622 ribu, dan biaya tenaga kerja lainnya sebesar Rp.887.557 ribu. Sedangkan beban tenaga kerja yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.112.521 ribu sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.1.519.465 ribu atau 36,95 persen. Penambahan jumlah karyawan pada tahun 2020 dan restrukturisasi penggajian menyebabkan kenaikan biaya tenaga kerja pada tahun 2020.

4) Beban Pendidikan dan Pelatihan

Beban pendidikan dan pelatihan yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.162.787 ribu. Biaya pendidikan dan pelatihan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill pengurus dan karyawan BPR sepanjang tahun 2020. Sedangkan beban pendidikan dan pelatihan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.211.290 ribu sehingga terjadi penurunan sebesar –Rp.48.503 ribu atau -22,96 persen. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir menyebabkan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan secara daring sehingga penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan menurun dibandingkan periode sebelumnya.

5) Beban Sewa

Beban sewa yang terjadi selama tahun 2020 adalah sebesar Rp.575.953 ribu, yang terdiri dari sewa gedung kantor sebesar Rp.324.500 ribu dan sewa lainnya sebesar Rp.251.453 ribu. Sedangkan beban sewa yang terjadi selama tahun 2019 adalah sebesar Rp.543.924 ribu sehingga naik sebesar Rp.32.029 ribu atau 5,89 persen.

6) Beban Penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan tahun 2020 adalah sebesar Rp.134.127 ribu, yang terdiri dari beban penyusutan aset tetap dan inventaris sebesar Rp.131.765 ribu dan beban amortisasi aktiva tak berwujud sebesar Rp.2.363 ribu. Sebagai perbandingan beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 adalah sebesar Rp.249.566 ribu sehingga turun sebesar -Rp.115.439 ribu atau 46,26 persen.

7) Beban Overhead Kantor Lainnya

Beban overhead kantor lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp.1.158.035 ribu, yang terdiri dari komponen beban-beban operasional sebesar Rp.1.112.575 ribu dan beban-beban non-operasional sebesar Rp.45.461 ribu. Sedangkan beban overhead kantor lainnya 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp.1.027.274 ribu sehingga naik sebesar Rp.130.761 ribu atau 12,73 persen.

d. Laba (Rugi) Usaha

Pada tahun 2020 PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang berhasil membukukan laba sebesar Rp.569.050 ribu. Akan tetapi secara kumulatif saldo laba (rugi) di neraca posisi 31 Desember 2020 masih tercatat rugi sebesar -Rp.4.462.281 ribu. Saldo rugi tersebut terjadi karena adanya kerugian yang dialami pada tahun 2016 sebesar Rp.5.986.094 ribu sebagai akibat dari pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa pra-operasional sejak tahun 2009 hingga 31 Desember 2015 sebesar Rp.4.837.111 ribu yang harus dibebankan sekaligus pada tahun pertama operasional dan tidak boleh ditangguhkan.

Sebagai perbandingan pada tahun 2019 PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang membukukan kerugian sebesar -Rp.462.592 ribu.

ribuan rupiah

Pendapatan Operasional	14.645.491
Beban Operasional	14.061.135
Laba Operasional	**584.356**
Pendapatan Non Operasional	30.155
Beban Non Operasional	45.461
Rugi Non Operasional	**(15.306)**
LABA TAHUN 2020	**569.050**
AKUMULASI RUGI TAHUN SEBELUMNYA	**(5.031.331)**
SALDO LABA (RUGI)	**(4.462.281)**

2. Rasio-Rasio Keuangan

Ditinjau dari rasio-rasio keuangan, PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang mencatat rasio-rasio yang cukup sehat. Rasio KPMM sebesar 58,70% menunjukkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang memiliki permodalan yang kuat. Rasio KAP dan PPAP tercatat masing-masing sebesar 12,00% dan 100%. Sedangkan dari segi rentabilitas rasio Return on Aset (RoA) sebesar 0,61% dan BOPO sebesar 96,01%. Dari segi liquiditas, Cash Ratio tercatat sebesar 20,61% dan LDR sebesar 75,81%. Sedangkan NPL dan NPL net pada tahun 2020 masing-masing sebesar 18,70% dan 11,65%.

Rasio-Rasio Keuangan

RASIO KEUANGAN		2020	2019
PERMODALAN			
1	KPMM	58,70%	64,97%
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF			
1	RASIO KAP	12,00%	12,91%
2	RASIO PPAP	100,00%	100,00%
3	NPL	18,70%	18,11%
4	NPL Net	11,65%	13,61%
RENTABILITAS			
1	RETURN ON ASET (ROA)	0,61%	-0,55%
2	RASIO BOPO	96,01%	103,11%
LIKUIDITAS			
1	CASH RATIO	20,61%	9,51%
2	LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)	75,81%	78,86%

3. Penanganan Kredit Bermasalah

Penanganan kredit bermasalah dimulai sejak awal pengajuan kredit, dengan melakukan analisa resiko yang akurat dan menentukan antisipasinya. Selanjutnya setelah dilakukan pencairan kredit, bagian kredit harus melakukan monitoring terhadap *account* yang dikelolanya sampai dengan kredit lunas. Untuk Kredit Bermasalah (col. 3, 4, dan 5) akan dilakukan penagihan tunggakkan secara aktif, intensif dan berkesinambungan dengan tetap mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan.

Untuk debitur-debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran karena penurunan usaha, namun masih kooperatif dan memiliki itikad baik untuk membayar angsuran, maka akan dilakukan penyelamatan kredit. Bentuk dari penyelamatan kredit, dapat berupa :

- Penjadwalan kembali angsuran (*rescheduling*)
  Perubahan syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran angsuran dan jangka waktu.
- Persyaratan kembali kredit (*recondition*)
  Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit, meliputi perubahan jadwal pembayaran angsuran, jangka waktu pembayaran atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum sisa kredit.
- Penataan kembali (*restructuring*)
  Yaitu perubahan syarat kredit menyangkut; Penambahan jumlah pokok kredit, atau sebagian atau seluruh tunggakan bunga dikonversi menjadi pokok kredit baru, dapat pula disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali. Dalam melaksanakan hal tersebut diatas

akan dilakukan permohonan kredit oleh Debitur, dan dianalisa kembali kemampuan membayar, analisa usaha dan jangka waktu kredit..

Apabila upaya penyelamatan kredit bermasalah menemui jalan buntu dan Debitur sudah tidak lagi memiliki kemampuan membayar maka akan dilakukan penyelesaian kredit melalui pelelangan ataupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Debitur non ASN Debitur yang masuk dalam kategori NPL secara umum disebabkan karena mengalami masalah penurunan usaha, sedangkan Debitur ASN yang masuk dalam kategori NPL disebabkan karena terjadinya penurunan penghasilan sebagai akibat dari kebijakan mutasi dan/atau demosi jabatan pada instansi tempatnya bekerja.

Pada posisi Desember 2020 jumlah kredit bermasalah adalah sebesar Rp.11.283.702 ribu dari total kredit yang diberikan sebesar Rp.60.332.303 ribu sehingga rasio Non Performance Loan (NPL) adalah sebesar 18,70%. Apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2019 jumlah kredit bermasalah sebesar Rp.10.880.691 ribu dari total kredit diberikan sebesar Rp.60.072.734 ribu dan rasio NPL adalah sebesar 18,11% sehingga terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp.403.011 ribu dengan peningkatan rasio NPL naik sebesar 0,59%.

Adapun penyebab utama kredit bermasalah pada tahun 2020 berdasarkan jenis produk kredit adalah sebagai berikut :

1. Kredit ASN (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.2.171.894 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.31.691.338 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 6,85%)
    a. Adanya keterlambatan pembayaran TPP di Pemerintah Kota Palembang (berkaitan dengan anggaran).
    b. Beralihnya pemberlakuan TPP yang dasar pembayarannya adalah Perwali menjadi Tunjangan Kinerja (Tukin) yang dasar pembayarannya dari Kemendagri yang mengakibatkan sebagian Debitur mengalami penurunan penghasilan.
    c. Beberapa Debitur meminta kepada bendahara gaji untuk menunda pemotongan Tukinnya dengan alasan ada keperluan mendesak.
    d. Adanya rotasi dan mutasi debitur dan bendahara di lingkungan ASN Kota Palembang.

2. Kredit Pedagang/Umum/Kredit Modal Kerja (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.136.279 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.1.656.323 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 8,23%)
   a. Pandemi Covid-19 menyebabkan usaha debitur mengalami penurunan sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
   b. Kurangnya monitoring kepada debitur.
   c. Beberapa Debitur beritikad tidak baik dalam membayar kewajibannya.

3. Kredit Multi Guna (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.2.675.964 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.11.912.509 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 22,46%)
   a. Pengaruh pandemi Covid-19 beberapa debitur yang yang sumber pembayarannya dari hasil usaha dan usaha Debitur tersebut mengalami penurunan sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
   b. Kurangnya monitoring kepada debitur.
   c. Untuk Kredit Multi Guna yang sumber pembayarannya dari pemotongan gaji bulanan, beberapa Debitur mengundurkan diri dan pindah bekerja sehingga tidak dapat dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran sedangkan asuransi jiwa dan PHK tidak mengcover pengunduran diri debitur.
   d. Beberapa Debitur beritikad tidak baik dalam membayar kewajibannya.

4. Kredit Program UKM (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.2.270.500 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.4.462.500 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 50,88%)
   a. Usaha debitur mengalami penurunan akibat terdampak pandemi covid-19sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
   b. Beberapa Debitur pindah domisili dan usaha, sehingga Bank kesulitan untuk melakukan penagihan.
   c. Jumlah Debitur yang relatif besar membuat Bank kesulitan untuk melakukan monitoring.
   d. Beberapa Debitur beritikad tidak baik dalam membayar kewajibannya.

5. Kredit Investasi (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.39.764 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.5.352.235 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 0,74%)

a. Monitoring dilakukan secara ketat dan beberapa Debitur telah dilakukan restrukturisasi bagi yang mengalami kesulitan membayar angsuran akibat penurunan usaha terdampak covid-19.
b. Debitur cukup kooperatif dalam menginformasikan kondisi usaha yang menjadi sumber utama pengembalian angsuran.

6. Kredit KPR Umum (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.148.547 dari total O/S kredit sebesar Rp.1.331.211 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 11,16%)
   a. Usaha debitur mengalami penurunan akibat terdampak pandemi covid-19sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
   b. Ada 1 (satu) Debitur telah dilakukan restrukturisasi karena mengalami kesulitan membayar angsuran akibat penurunan usaha terdampak covid-19 dan saat ini pembayaran angsuran sudah membaik.
   c. Monitoring dilakukan secara ketat untuk tetap menjaga kualitas kredit lancar.

7. Kredit Channeling (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.0 dari total O/S kredit sebesar Rp.54.101 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 0,00%)
   a. Belum ada kredit bermasalah untuk jenis produk kredit ini.
   b. Monitoring akan terus dilakukan secara ketat untuk menjaga kualitas kredit.

8. Kredit Pasar Wong Kito (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.17.000 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.48.333 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 35,17%)
   a. Usaha debitur mengalami penurunan akibat terdampak pandemi covid-19sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
   b. Beberapa Debitur pindah domisili dan usaha, sehingga Bank kesulitan untuk melakukan penagihan.
   c. Beberapa Debitur beritikad tidak baik dalam membayar kewajibannya.

9. Kredit Rekening Koran (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.3.823.753 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp. 3.823.753 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 100,00%)
   a. Lemahnya dalam analisa kredit pada saat penyaluran kredit.
   b. Debitur sulit ditemui dan kurang kooperatif.
   c. Usaha debitur sudah tidak berjalan lagi.
   d. Debitur beritikad tidak baik dalam membayar kewajibannya

Adapun Upaya perbaikan kualitas kredit untuk menekan NPL dilaksanakan dengan strategi-strategi antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat kerjasama dengan Instansi-Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perusahaan Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
2. Meningkatkan penyaluran kredit sesuai dengan target yang telah direncanakan.
3. Menerbitkan surat peringatan terhadap debitur yang telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
4. Melakukan perbaikan kualitas kredit dengan upaya penagihan *(cash collection)* dan percepatan restrukturisasi kredit bagi debitur yang masih memiliki sumber pembayaran angsuran.
5. Melakukan eksekusi agunan debitur untuk menurunkan kewajiban *(downsizing)* atau untuk menutup fasilitas kredit secara menyeluruh.
6. Melakukan *legal action* atas debitur yang tidak prospek dan tidak kooperatif, seperti :
   - Eksekusi Agunan dengan Parate Eksekusi APHT & Fidusia terdaftar. Gugat Sita Agunan untuk pengosongan apabila eksekusi agunan tidak berhasil.
   - Lelang HT & Fidusia melalui KPKLN guna penyelesaian kredit dgn agunan.
   - Gugatan Sederhana melalui PN untuk debitur yang tidak kooperatif.
   - Proses Pidana untuk debitur-debitur yang terbukti tidak kooperatif dan mempunyai pelanggaran pidana.
   - Kepailitan melalui Pengadilan Niaga untuk debitur tidak kooperatif.
   - AYDA utk penyelesaian kredit melalui penyerahan agunan.

Bagian Ketiga

Laporan Pengelolaan Perusahaan

1. Aktivitas Utama

Anggaran Dasar Perseroan menandaskan, bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan aktivitas kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit, serta menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

a. Penghimpunan Dana

Struktur pendanaan ditunjang dari sumber-sumber dana masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka. Untuk mengisi kekurangan/gap antara portofolio pinjaman dengan dana masyarakat yang mampu dimobilisasi, digunakan dana antarbank passiva atau simpanan dari bank lain dalam bentuk deposito berjangka.

1). Tabungan

Total dana yang berhasil dihimpun melalui produk tabungan pada tahun 2020 mencapai Rp.6.481.879 ribu. Saat ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang memiliki 3 (tiga) produk tabungan yaitu Tabungan Pasar Perdana-Perorangan sebesar Rp.5.254.287 ribu, Tabungan Pasar Perdana-Non Perorangan sebesar Rp.1.227.571 ribu dan Tabungan Pelajar Palembang sebesar Rp.20 ribu.

Struktur Pendanaan Tahun 2020

dalam ribuan Rupiah

No	PENDANAAN	SALDO 2019	%
1	Tabungan	Rp. 6.481.879	12,65
2	Deposito Berjangka	Rp. 29.369.105	57,30
3	Antar Bank Passiva	Rp. 15.400.000	30,05
	Total	**Rp. 51.250.984**	**100,00**

2). Deposito Berjangka

Saldo deposito berjangka posisi tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.29.369.105 ribu dengan rincian saldo deposito berjangka 1 (satu) bulan sebesar Rp.6.544.483 ribu, deposito berjangka 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.031.000 ribu, deposito berjangka 6 (enam) bulan sebesar Rp.13.840.122 ribu, dan saldo deposito berjangka 12 bulan sebesar Rp.5.953.500 ribu.

3). Antarbank Passiva

Posisi 31 Desember 2020 pendanaan dari penempatan antar bank passiva yang berhasil dihimpun sebesar Rp.15.400.000 ribu, yang terdiri dari simpanan dari bank lain 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan 6 (enam) bulan masing-masing sebesar Rp.1.000.000 ribu, Rp.2.500.000 ribu dan Rp.11.900.000 ribu.

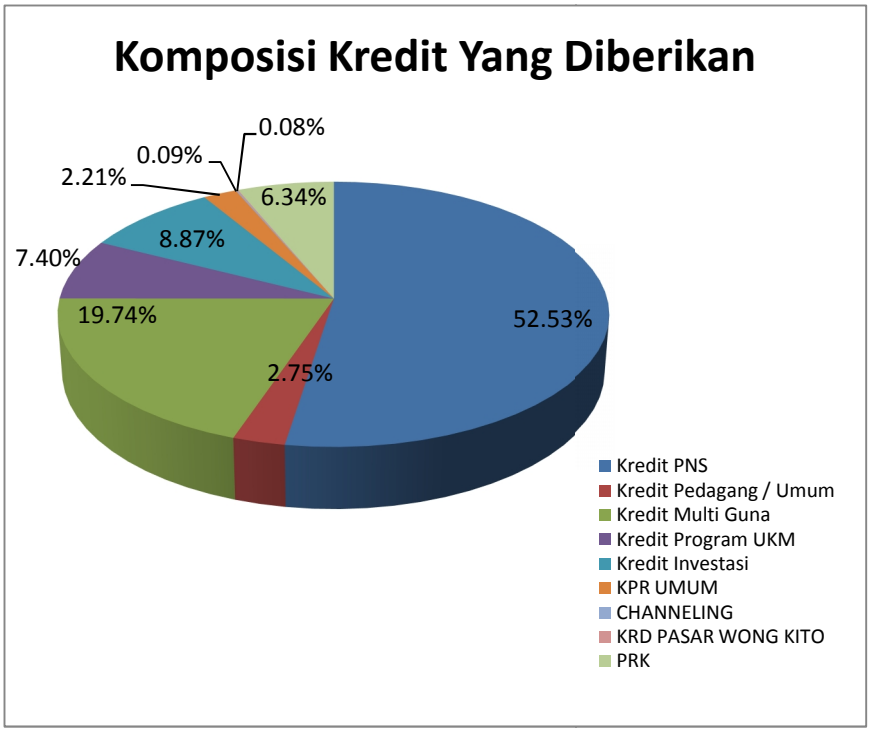
b. Penyaluran Dana

Saldo outstanding kredit pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp.60.332.303 ribu. Adapun produk kredit / pinjaman yang diberikan terdiri dari 9 (sembilan) jenis kredit yaitu :

dalam ribuan Rupiah

NO	JENIS KREDIT	SALDO O/S	%
1	Kredit PNS	31,691,338,482	52.53%
2	Kredit Pedagang / Umum	1,656,322,694	2.75%
3	Kredit Multi Guna	11,912,508,558	19.74%
4	Kredit Program UKM	4,462,500,000	7.40%
5	Kredit Investasi	5,352,235,460	8.87%
6	Kredit KPR Umum	1,331,210,869	2.21%
7	Kredit Channeling	54,100,543	0.09%
8	Kredit Pasar Wong Kito	48,333,332	0.08%
9	Pinjaman Rekening Kora	3,823,753,214	6.34%
	TOTAL	**60,332,303,151**	**100.00%**

Komposisi Kredit Yang Diberikan Tahun 2020



Bagian Keempat

Kebijakan dan Strategi Perusahaan

1. Kebijakan-kebijakan Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang merealisasikan beberapa kebijakan dan strategi pengembangan perusahaan, baik yang terkait dengan perubahan kelembagaan, pengembangan daya dukung operasional, peningkatan kualitas SDM dan insfrastruktur serta pengembangan jaringan pemasaran. PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang juga secara konsisten mengimplementasikan prinsip pengendalian risiko/manajemen resiko, *Good Corporate Governance* (GCG), dan senantiasa menjalin kemitraan secara eksternal, baik terhadap lembaga keuangan sejenis, maupun masyarakat sekitar melalui penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

a. Penguatan Institusi Internal

Secara internal, PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang selalu melakukan upaya konkrit pengembangan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi dan penguatan visi dan misi perusahaan. Penyusunan visi, misi dan filosofi perusahaan melibatkan seluruh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris. Sementara untuk pengembangan struktur organisasi, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah melakukan beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan, antara lain dengan dibentuknya Tim Penyelesaian Kredit Bermasalah (TPKB) melalui SK Dir No.011/BPR-BP/KEP/XI/2020 tanggal 05 November 2020. TPKB diketuai oleh Direktur BPR Palembang dan beranggotakan 9 (sembilan) orang dari Credit Support, Remedial dan Account Officer. Dengan dibentuknya TPKB diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kredit bermasalah.

b. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Termasuk Bonus, Tantiem, dan Fasilitas Lain

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain hingga 31 Desember 2020 belum ada perubahan dan masih berpedoman pada hasil keputusan RUPS tanggal 14 Mei 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 08 tanggal 14 Mei 2018.

c. Pengembangan Jaringan Pemasaran

Salah satu kebijakan pengembangan jaringan pemasaran yaitu dengan melakukan sosialisasi produk-produk PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang secara kontinu ke instansi-instansi di bawah Pemerintah Kota Palembang dan melakukan kerja sama dengan Kepala-kepala SKPD dan bendaharawan/ti pemotong gaji di lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk dapat membantu Bank dalam melakukan analisis awal sekaligus memberikan rekomendasi terhadap calon-calon debitur potensial untuk kemudian ditinjaklanjuti oleh Account Officer. Adapun pengembangan jaringan pemasaran lainnya yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM kota Palembang beserta kecamatan dan kelurahan dalam rangka penyaluran kredit program UKM yang diharapkan dapat memberikan kontribusi laba bagi BPR Palembang sekaligus membantu percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya sektorUusaha Kecil dan Mikro (UKM) di Kota Palembang.

d. Peningkatan Kualitas SDM

Jumlah karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang pada posisi Desember 2020 berjumlah 47 orang, bertambah jika dibandingkan dengan jumlah karyawan pada posisi 31 Desember 2019 yang berjumlah 38 orang. Adapun klasifikasi jenjang pendidikan karyawan adalah sebagai berikut :

Klasifikasi Jenjang Pendidikan Karyawan Tahun 2020

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	4
2	D 3	8
3	S 1	35
	Jumlah	**47**

Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi SDM, PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang berpartisipasi pada beberapa program pendidikan dan pelatihan SDM, baik yang diselenggarakan secara internal maupun program pendidikan dan pelatihan SDM yang diselenggarakan oleh pihak eksternal dan asosiasi. Pelatihan dan Pendidikan SDM lebih banyak dilakukan secara daring mengingat pandemic Covid-19 yang belum berakhir. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Lokakarya Perpajakan yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Keuangan dan Informasi Perpajakan pada tanggal 16 Januari 2020.
2. Workshop Analisa Kredit BPR sesuai POJK yang diselenggarakan oleh CV. Meta Dinamika pada tanggal 07-08 Februari 2020.
3. Bimtek Perpajakan Bagi BPR yang diseslenggarakan oleh Media Tax Community pada tanggal 11-12 Maret 2020.
4. Restrukturisasi Kredit Covid-19 yang diselenggarakan oleh Zpro Consulting pada tanggal 13 Mei 2020.
5. Sosialisasi Transaksi Non Tunai yang diselenggarakan oleh Perbamida pada tanggal 15 Mei 2020.
6. Strategi Pemasaran Produk Bank dalam Menghadapi Ketidakpastian akibat Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Jakarta Financial Institute pada tanggal 15 Mei 2020.
7. Penanganan Kredit Bermasalah secara non Litigasi pada Pandemi Covid 19 yang diselenggarakan oleh Jakarta Financial Institute pada tanggal 20 Mei 2020.
8. Step by Step Membuat Key Performance Indicator (KPI) yang diselenggarakan oleh HRD Forum pada tanggal 26-27 Mei 2020.
9. Pengawasan Dekom BPR yang diselenggarakan oleh Zpro Consulting pada tanggal 17 Juni 2020.
10. Pelatihan SDM Hukum Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Service Leadership pada tanggal 30 Juli 2020.
11. Pelatihan Remunerasi untuk BPR dan FGD (Focus Group Discussion) Draft Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Organ Kepegawaian, Komite dan Asosiasi BUMD, yang diselenggarakan oleh Perbamida pada tanggal 04 Agustus 2020.
12. Pelatihan Digital Managemen KPI yang diselenggarakan oleh Infobank Institute pada tanggal 06 Agustus 2020.
13. Pelatihan Service Excellent yang diselenggarakan oleh Lingga Darma Consulting pada tanggal 29-30 Agustus 2020.
14. Negoisasi Penagihan Yang Efisien & Efektif, yang diselenggarakan oleh P. Hadisaputro Law Office pada tanggal 05 Oktober 2020.
15. Optimalisasi Penanganan FRAUD (Kecurangan) di Perusahaann melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi, yang diselenggarakan oleh P. Hadisaputro Law Office pada tanggal 06 Oktober 2020.
16. Master Bisnis BPR/S Melakukan Analis Kredit BPR dengan 6C dan Legalitas Kredit, yang diselenggarakan oleh CV. Meta Dinamika pada tanggal 12 Oktober 2020.
17. WOL Menyususn Rencana Bisnis Bank BPR/S Tahun 2021 Berbasis Business Continuty Management (BCM), yang diselenggarakan oleh CV. Meta Dinamika pada tanggal 21 Oktrober 2020.
18. Menyusun Target Kinerja Setiap Unit Kerja Karyawan dengan KPI dan OKR Dampak Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan oleh CV. Meta Dinamika pada tanggal 22 Oktober 2020.

19. Kader Norma Ketenagakerjaan Jenjang Muda (KNK Muda) yang diselenggrakan oleh Sertifikasi Kompetensi Mandiri pada tanggal 16-20 November 2020.
20. Audit Penerapan Managemen Resiko, yang diselenggarakan oleh Yayasan Perbarindo Jakarta pada tanggal 08 Desember 2020.

e. Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Teknologi Informasi

1. Sistem Operasional Teknologi Informasi

Kebijakan ini antara lain direalisasikan dalam bentuk penyempurnaan sistem aplikasi perbankan (*core banking system*) milik Telkom Sigma untuk meningkatkan pelayanan pada nasabah dan keamanan data serta menyesuaikan dengan regulasi yang terus berkembang. Pada tahun 2020, pihak vendor *core banking system* (Telkom Sigma) telah melakukan beberapa *upgrade* untuk menyesuaikan dengan kebutuhan BPR, diantaranya release Program Restrukturisasi Non Reguler untuk BPR sesuai POJK No 11 tahun 2020 yang sudah bisa digunakan pada tanggal 08 Mei 2020. Program Restrukturisasi Non Reguler ini untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap debitur-debitur yang mengalami penurunan dan kesulitan usaha sehingga membutuhkan restrukturisasi khusus sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019.

2. Sistem Keamanan dan Penyedia Teknologi Informasi

Sistem keamanan teknologi informasi sudah dituangkan dalam SOP Teknologi Informasi dan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang bekerja sama dengan pihak vendor *core banking system* Telkom Sigma dalam hal pengamanan data dengan data center yang berlokasi di Serpong dan Surabaya. Selain itu juga dilakukan kerja sama dengan Bank Umum diantaranya *cash management system* dan *virtual account* yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Nasabah dan/atau Debitur dan untuk mempermudah pembayaran angsuran kredit debitur.

Penyedia Teknologi Informasi

Core Banking System	:	TELKOM SIGMA (Layanan Satu)
Cash Management System	:	Bank Permata Syariah, Bank Jawa Barat & Banten, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank Maspion, Bank J Trust Indonesia
Virtual Account	:	Bank Permata Syariah, Bank Maspion

f. Penguatan Jaringan dan Kerjasama Eksternal

1. Perkembangan dan Target Pasar

Posisi Desember 2020 PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah menyalurkan kredit kepada 1.033 debitur ASN dengan total outstanding kredit sebesar Rp.31.691.338 ribu. Sedangkan penyaluran kredit program UKM pada tahun 2020 telah disalurkan kepada 2.542 debitur dengan total outstanding sebesar Rp.4.462.500 ribu. Untuk Kredit Multi Guna (KMG) penyaluran kredit dilakukan kepada 83 Debitur dengan total outstanding kredit sebesar Rp.11.912.509 ribu.

dalam ribuan rupiah

NO	JENIS KREDIT	SALDO O/S	%
1	Kredit PNS	31,691,338,482	52.53%
2	Kredit Pedagang / Umum	1,656,322,694	2.75%
3	Kredit Multi Guna	11,912,508,558	19.74%
4	Kredit Program UKM	4,462,500,000	7.40%
5	Kredit Investasi	5,352,235,460	8.87%
6	Kredit KPR Umum	1,331,210,869	2.21%
7	Kredit Channeling	54,100,543	0.09%
8	Kredit Pasar Wong Kito	48,333,332	0.08%
9	Pinjaman Rekening Kora	3,823,753,214	6.34%
TOTAL		**60,332,303,151**	**100.00%**

PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang akan terus menyalurkan kredit program UKM sesuai Perwali dan Surat Penunjukan dari Pemerintah Kota Palembang dalam rangka membantu program pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro di Kota Palembang . Penyaluran kredit kepada ASN juga akan terus menjadi prioritas melalui peningkatan kerja sama dengan instansi-instansi di lingkungan pemerintah Kota Palembang.

2. Jaringan Kerja dan Mitra Usaha

Jaringan kerja yang dibangun di tahun 2020 yaitu melakukan perjanjian kerja sama dengan dinas-dinas dan kecamatan-kecamatan di Kota Palembang. PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang juga menjalin kemitraan dengan BUMD-BUMD Kota Palembang, antara lain PD Pasar, PT SP2J, PT PLPJ, dan lain-lain. Kerjasama ditujukan untuk memperkuat posisi PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dalam penyaluran kredit untuk ASN dan pegawai BUMD di lingkungan kota Palembang yang merupakan *captive market* bagi PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Upaya untuk terus terlibat secara aktif pada berbagai kegiatan organisasional asosiatif guna pengembangan perusahaan akan terus dilakukan antara lain kegiatan yang terkait dengan program kerja Perbamida dan Perbarindo Sumatera Bagian Selatan. Selain itu upaya meningkatkan kerja sama dengan mitra bisnis seperti Bank Umum juga akan terus dipererat dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Nasabah dan peningkatan teknologi informasi BPR.

2. Implementasi Manajemen Resiko

PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang dalam operasionalnya senantiasa menerapkan prinsip *prudential banking*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari segala resiko yang dapat terjadi yang berpotensi merugikan bank. Identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan melalui beberapa aspek resiko sebagai berikut :

a.. Resiko Kredit

Antara lain dengan menerapkan beberapa strategi seperti : analisis cermat realisasi aplikasi kredit, penggunaan pusat data Informasi Debitur dari Aplikasi, melakukan pegikatan jaminan secara notarial, penutupan asuransi jiwa, PHK, kemacetan dan kerugian yang disesuaikan dengan jenis dan plafond kredit serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian kredit bermasalah.

b. Risiko Likuiditas

Menerapkan sistem kendali kebutuhan likuiditas perusahaan secara harian, baik untuk pelayanan kredit maupun simpanan.

c. Risiko Operasional

Antara lain dengan menerapkan beberapa kebijakan pengendalian/ pembatasan transaksi secara berjenjang, peningkatan pengawasan internal secara efektif dan optimal.

d. Risiko Kepatuhan

Antara lain dengan membuat / merancang kebijakan dan standar prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan seluruh unsur dalam perusahaan mentaati dan menjalankan semua peraturan yang berlaku dengan penuh tangggung jawab dan berkomitmen tinggi.

3. Prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik

PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan senantiasa mengedepankan aspek dan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibility, indepedensi, dan fairness (kesetaraan dan kewajaran). Nilai-nilai tata kelola sebagaimana dimaksud dengan TARIF, telah diimplementasikan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi seperti :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang didalamnya mencakup tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 30/SK-Dir/BPR-PASAR/IX/2017 yang diberlakukan sejak tanggal 26 September 2017.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang didalamnya mencakup tugas, wewenang dan tanggungjawab

Dewan komisaris dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BPR/XI/2017 yang diberlakukan sejak tanggal 27 November 2017.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah memiliki kelengkapan tugas dan fungsi komite antara lain Komite Kredit, Komite SDM, dan Aset Liability Committee (ALCO).

4. Penanganan benturan kepentingan

   Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pada tanggal 31 Oktober 2019 telah diberlakukan Standar Prosedur dan Operasi tentang Benturan Kepentingan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 18/SK-Dir/BPR-PLG/X/2019.

5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah membentuk Fungsi Kepatuhan sejak tanggal 20 Maret 2017 dengan menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan telah membuat kebijakan dan prosedur tentang fungsi kepatuhan pada tanggal 05 Februari 2018.

   Demikian halnya dengan fungsi audit intern, telah diangkat Pejabat Eksekutif Audit Intern sejak tanggal 29 Agustus 2016 dan telah memiliki kebijakan tentang audit intern pada tanggal 15 April 2017.

6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah melaksanakan penerapan manajemen risiko dengan menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko sejak tanggal 25 Juli 2017 dan telah membuat kebijakan dan prosedur terhadap Fungsi Manajemen Risiko yang mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 03 Juli 2018.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

   Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah mengatur dan memiliki kebijakan serta prosedur tentang BMPK sesuai Keputusan Direksi Nomor 026/SK-Dir/BPR-PASAR/VII/2017 yang telah diberlakukan sejak tanggal 01 Agustus 2017.

8. Rencana Bisnis BPR

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah melaksanakan dan membuat laporan mengenai rencana bisnis BPR dan mulai dilaporkan pertama kali tahun 2018. Sementara itu, rencana bisnis tahun 2021 telah dilaporkan secara online ke OJK pada tanggal 18 Desember 2020 dan telah disesuaikan dan disampaikan ulang ke OJK pada tanggal 25 Maret 2021.

9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

   Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR yaitu laporan publikasi yang di tampilkan pada *website* BPR : www.bankbprpalembang.com dan di publikasi pada salah satu media cetak di kota Palembang.

4. Perubahan Penting Lain yang Terjadi di BPR dan/atau di Kelompok Usaha BPR yang Mempengaruhi Operasional BPR

Pada tahun 2020 terjadi beberapa perubahan penting yang mempengaruhi operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang, antara lain :

- Terdapat perubahan komposisi pemgang saham PT bank Perkreditan Rakyat Palembang, yang disahkan di dalam Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 7 tanggal 11 Mei 2020 tentang Akta Pernyataan secara Sirkuler para Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0241356 pada tanggal 09 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan nomor AHU-AH.01.03-0241359 pada tanggal 09 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Salah satu keputusan di dalam Akta No. 7 tersebut yaitu terjadi pengalihan kepemilikan saham yang dimiliki Ir. Ahmad Syafriar kepada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya sebanyak 600 lembar saham atau nominal Rp. 60 juta sehingga komposisi saham PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang menjadi :

satuan rupiah

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Saham	Jumlah Saham (Rp)
1.	Pemerintah Kota Palembang	260.000 lembar	68,42	Rp. 26.000.000.000,-
2.	PT. Sarana Pembangunan Palembang	120.000 lembar	31,58	Rp. 12.000.000.000,-
TOTAL		**380.000 lembar**	**100,00**	**Rp. 38.000.000.000,-**

5. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat di lingkungan kantor dan wilayah Kota Palembang, PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang secara berkala mengadakan kegiatan syukuran yang dihadiri seluruh pengurus, karyawan, dan pemegang saham dengan mengundang beberapa panti asuhan dan pengurus Rukun Tetangga di lingkungan kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang yang disertai dengan pembagian bingkisan sembako dan bantuan dana.

Bagian Kelima

Laporan Keuangan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia
No.378/KM.1/2019

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00030/2.1269/AU.2/07/1394-1/1/IV/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT BPR Palembang

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Palembang yang terlampir, terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit wajar dengan pengecualian kami.

Alamat Kantor : Perumahan Mega Asri No. B3,
Jl. Garuda, Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. 55581
Telp. 0274 - 7371714
Email : Sandrapracipta@gmail.com
www.kapsandrapracipta.com

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia
No.378/KM.1/2019

Basis untuk opini wajar dengan pengecualian

Sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas keuangan No. 2.p, 3.13 bahwa PT BPR Palembang atas laporan keuangan pada tahun 2020, Perusahaan tidak mencadangkan kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2015) mengenai "lmbalan Kerja" dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang "Imbalan Kerja" serta Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 agar penerapannya sesuai dengan prinsip akuntansi di indonesia. Dampak atas tidak dibentuknya kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat ditentukan.

Opini

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam hal semua yang material, neraca PT BPR Palembang tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan PT BPR Palembang pada 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi didalam neraca dan laba rugi yang disertakan pada laporan terlampir untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang seharusnya menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Informasi didalam lampiran-lampiran merupakan tanggung jawab manajemen PT BPR Palembang yang dihasilkan dari catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan PT BPR Palembang tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponden terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Henry&Sugeng dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material tertanggal 03 Maret 2020.

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA

Sandra Pracipta, S.E., Ak., CA., CPA., *Asean* CPA.
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1394
Yogyakarta, 26 April 2021

Alamat Kantor : Perumahan Mega Asri No. B3,
Jl. Garuda, Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. 55581
Telp. 0274 - 7371714
Email : Sandrapracipta@gmail.com
www.kapsandrapracipta.com

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia
No.378/KM.1/2019

SURAT UNTUK MANAJEMEN

No. ML30/KAPSP/IV/26/2021

Kepada,
PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang (Perseroda)
Jl. R. Sukamto No. 2 C-D, Rt.042 Rw. 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang 30114, Sumatera Selatan, Indonesia.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kami mempertimbangkan struktur pengendalian intern perusahaan untuk menentukan prosedur audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak untuk memberikan keyakinan atas struktur pengendalian intern. Namun, kami temukan permasalahan tertentu yang menyangkut struktur pengendalian intern dan pelaksanaannya yang kami pandang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan menurut standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan mencakup permasalahan yang kami temukan, yang menyangkut kekurangan material dalam rancangan atau pelaksanaan struktur pengendalian intern, yang menurut pendapat kami, dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Laporan ini dimaksudkan hanya untuk memberikan informasi dan untuk digunakan oleh dewan komisaris, manajemen dan pihak lain dalam organisasi.

Hormat kami,

Hormat kami,
KAP SANDRA PRACIPTA, CPA

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

Sandra Pracipta, S.E., Ak., CA., CPA., *Asean*CPA.
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1394
Yogyakarta, 26 April 2021

Adapun permasalahan yang kami temukan dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Alamat Kantor : Perumahan Mega Asri No. B3,
Jl. Garuda, Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. 55581
Telp. 0274 - 7371714
Email : Sandrapracipta@gmail.com
www.kapsandrapracipta.com

Adapun permasalahan yang kami temukan dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. **Imbalan Kerja**

   Permasalahan
   Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang belum melakukan pencatatan kewajiban imbala kerja jangka panjang yang meliputi penghargaan dan ganti rugi kepada karyawan dan direksi belum membuat *Standard Operational Prosedure* terkait perhitungan untuk estimasi kewajiban imbalan Paska kerja.

   Dasar Ketentuan
   a. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 Tentang Imbalan Kerja.
   b. Pedoman Akuntasi Bank Perkreditan Rakyat BAB 5 No. 9 tentang Kewajiban Imbalan Kerja.
   c. Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

   Rekomendasi
   Kami menyarankan agar kedepannya untuk mematuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang Imbalan Kerja.

   Tanggapan Managenent :
   SOP dan pencatatan serta pencadangan kewajiban imbalan kerja yang sudah ada akan disesuaikan dengan ketentuan.

2. **Kondisi**
   Program akuntansi belum bisa menyajikan informasi terkait posisi pos akun Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima Kredit yaitu Program Akuntasi BPR tidak bisa menampilkan perhitungan Pendapatan Yang Akan Diterima per debitur dan hanya mutasinya saja sehingga pemeriksa tidak bisa melakukan *reperforming* untuk akun tersebut dan juga program belum ada akun untuk Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima Antar Bank Aktiva.

   Rekomendasi
   Diharapkan BPR melakukan pemutakhiran sistem atau program akuntansi sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku sehingga memudahkan pemakai program akuntansi dalam membaca maupun monitoring output sistem.

   Tanggapan Managenent :
   Setuju akan dilakukakan permutakhiran sistem atau program akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku.

3. **Kondisi**

Berdasarkan sampling kredit yang kami lakukan terdapat debitur yang *BI checking* memiliki kolektabilitas 5 (Macet) pada bank umum akan tetapi masih diberikan pinjaman oleh BPR dan ada juga beberapa debitur yang diberikan fasilitas kredit melebihi anggunan yang dijaminkan.

Kriteria

Pedoman Standar Kebijakan Perkreeditan Bank Perkreditan Rakyat

Rekomendasi

Disarankan PT BPR Palembang menerapkan prinsif kehati-hatian sesuai dengan Pedoman Standar Kebijakan Perkreeditan Bank Perkreditan Rakyat.

Tanggapan Management :

Debitur kolektibilitas kredit 5 (macet) namun tetap diberikan fasilitas kredit dengan pertimbangan :

1. *Pembayaran angsuran dengan sistem potong gaji (penghasilan).*
2. *Dana pencairan kredit diblokir sebesar tunggakan kartu kredit dan ada memo deviasi atas hal tersebut.*

Sedangkan adanya debitur dengan fasilitas kredit melebihi agunan yang dijaminkan dengan pertimbangan :

1. *Pembayaran angsuran dengan sistem potong gaji (penghasilan).*
2. *Fasilitas kredit adalah KTA dengan pembayaran angsuran dari pemotongan gaji atau penghasilan.*

Ke depan Bank akan meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dan pedoman standar kebijakan perkreditan BPR dalam pemberian kredit.

4. **Kondisi**

a. Kelemahan pada pemberian kredit modal kerja
b. Kelemahan pada pemberian kredit rekening Koran
c. Kelemahan pada pemberian kredit UMKM merupakan program Pemkot.
d. Kelemahan pada pemberian kredit DPRD

Kriteria

Pedoman Standar Kebijakan Perkreeditan Bank Perkreditan Rakyat

Rekomendasi

Disarankan PT BPR Palembang menerapkan prinsif kehati-hatian sesuai dengan Pedoman Standar Kebijakan Perkreeditan Bank Perkreditan Rakyat.

Tanggapan Managenent :

Setuju, ke depan Bank akan meningkatkan penerapan prinsisp kehati-hatian dan pedoman standar kebijakan perkreditan BPR dalam pemberian kredit.

5. Tindak Lanjut Temuan SPI

Kondisi

Pasal 30 Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Kriteria

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Komisioner Toritas Jasa Keuangan,

Rekomendasi

Disarankan agar Direksi dan Komisaris lebih memaksimalkan temuan-temuan Audit Internal dan menindaklanjuti dari temuan tersebut sehingga tujuan dibentuknya Audit Internal bisa membantu manajemen dalam merencanankan dan menyelelesaikan terkait kredit-kredit bermasalah yang ada pada perusahaan.

Tanggapan Managenent :
Setuju ke depan Dewan Komisaris dan Direksi akan menindaklanjuti temuan-temuan Audit Internal dan eksternal.

6. Pemberian Bunga yg diatas LPS (Special Rate) ABP dan Deposito Pihak KeIII

Kondisi

Perusahaan memberikaan rate bunga diatas suku bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Kriteria

Surat Edarann LPS (tolong diisikan)

Rekomendasi

Disarankan agar Direksi dan Komisaris lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dalam pemberian rate bunga diatas LPS karena kredit yang disalurkan ke masyarakat banyak dalam program UMKM yang rate bunganya rendah.

Tanggapan Managenent :
Strategi penghimpunan dana disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas Bank dengan memperhatikan ketentuan LPS.

NERACA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
Per 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ASET			
Kas	2.c,3.1	846,193,900	904,796,700
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	2.d,3.2	808,637,411	1,011,596,137
Penempatan pada Bank Lain	2.e,3.3	25,223,619,166	18,234,579,626
PPAP Penempatan Pada Bank Lain	2.g,3.3	-	(47,000,000)
Total		25,223,619,166	18,187,579,626
Kredit yang Diberikan	2.f,3.4	60,332,303,151	60,072,733,855
Provisi & Adm.	2.f,3.4	(378,256,455)	(433,456,351)
Restrukturisasi Kredit		(128,465,443)	(148,155,812)
PPAP Kredit Yang Diberikan	2.g,3.4	(4,277,279,310)	(2,948,251,744)
Total		55,548,301,943	56,542,869,949
Agunan Yang Diambil Alih	2.h,3.5	2,720,000,000	1,900,000,000
Aset Tetap dan Inventaris	2.i,3.6	1,312,431,590	1,225,303,590
Akum. Peny. Aset Tetap & Inventaris	2.i,3.6	(969,902,511)	(846,382,503)
Total		342,529,079	378,921,087
Aset Tidak Berwujud	2.j,3.7	19,505,000	16,670,000
Akum. Peny. Aset Tidak Berwujud	2.j,3.7	(16,613,304)	(14,250,804)
Total		2,891,696	2,419,196
Aset lain-lain	2.k,3.8	684,198,570	986,155,441
JUMLAH ASSET		**86,176,371,765**	**79,914,338,136**

KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	2.l,3.9	1,151,893,276	603,161,664
Utang Bunga	2.m,3.10	220,100,867	177,803,044
Simpanan	2.n,3.11		
Tabungan		6,481,878,662	6,439,187,271
Deposito Berjangka		29,369,104,691	26,814,796,904
Simpanan dari Bank Lain	2.o,3.12	15,400,000,000	12,900,000,000
Kewajiban Imbalan Kerja	2.p,3.13	3,544,140	2,702,900
Kewajiban Lain-lain	2.q,3.14	12,130,688	8,017,207
Jumlah Kewajiban		**52,638,652,324**	**46,945,668,991**
EKUITAS	2.r,3.15		
Modal			
Modal Dasar		100,000,000,000	100,000,000,000
Modal Belum Disetor		(62,000,000,000)	(62,000,000,000)
Modal Disetor		**38,000,000,000**	**38,000,000,000**
Saldo laba	2.s,3.15		
Cadangan Umum		-	-
Cadangan Tujuan		-	-
Laba Yang Belum Ditentukan Tujuannya:			
Laba (Rugi) Tahun Lalu		(5,031,330,855)	(4,568,738,539)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		569,050,296	(462,592,316)
Jumlah Saldo laba		**(4,462,280,559)**	**(5,031,330,855)**
Jumlah Ekuitas		**33,537,719,441**	**32,968,669,145**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**86,176,371,765**	**79,914,338,136**

Palembang, 26 April 2021

Penyusun	Direview	Disetujui	
M Irfan Ghifari	Eko Karnain	Slamet	Syafril
Staf Akuntansi	Manager Operasional	Direktur	Direktur Utama

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN LABA RUGI
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	2.t,3.16		
Bunga Kontraktual		13,306,856,470	11,275,874,557
Provisi Dan Jasa Administrasi		882,276,896	812,801,383
Beban Transaksi		(335,131,782)	(91,587,003)
Jumlah Pendapatan Bunga		**13,854,001,584**	**11,997,088,936**
Beban Bunga	2.u,3.18	(4,767,660,938)	(4,374,206,535)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.t,3.17	791,489,589	1,362,656,404
Jumlah Pendapatan Operasional		**9,877,830,236**	**8,985,538,805**
Beban Operasional	2.u		
Beban Penyisihan Kerugian	3.19	1,676,045,916	3,326,948,246
Beban Pemasaran	3.20	100,581,208	119,039,721
Beban Administrasi dan Umum	3.21	7,407,885,351	5,857,911,329
Beban Operasional Lainnya	2.22	108,961,515	96,553,855
Jumlah Beban Operasional		**9,293,473,990**	**9,400,453,151**
Laba (Rugi) Operasional		**584,356,246**	**(414,914,346)**
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional	2.v,3.23	30,154,850	23,393,344
Beban Non Operasional	2.w,3.24	(45,460,801)	(71,071,314)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**(15,305,951)**	**(47,677,970)**
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		**569,050,296**	**(462,592,316)**
Taksiran Pajak Penghasilan	2.x,3.25	-	-
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		**569,050,296**	**(462,592,316)**

Palembang, 26 April 2021

Penyusun	Direview	Disetujui	
M Irfan Ghifari	Eko Karnain	Slamet	Syafril
Staf Akuntansi	Manager Operasional	Direktur	Direktur Utama

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	MODAL DISETOR	SALDO LABA			JUMLAH
		CADANGAN TUJUAN	CADANGAN UMUM	BLM DITENTUKAN TUJUANNYA	
Saldo per 31 Desember 2016	**12.000.000.000**	**-**	**-**	**(5.986.093.754)**	**6.013.906.246**
Penambahan Modal Distor	13.000.000.000	-	-	-	13.000.000.000
Laba rugi tahun berjalan	-	-	-	1.006.930.696	1.006.930.696
Saldo 31 Desember 2017	**25.000.000.000**	**-**	**-**	**(4.979.163.058)**	**20.020.836.942**
Penambahan Modal Distor	13.000.000.000	-	-	-	13.000.000.000
Laba rugi tahun berjalan	-	-	-	410.424.518	410.424.518
Saldo per 31 Desember 2018	**38.000.000.000**	**-**	**-**	**(4.568.738.539)**	**33.431.261.461**
Laba rugi tahun berjalan	-	-	-	(462.592.316)	(462.592.316)
Saldo per 31 Desember 2019	**38.000.000.000**	**-**	**-**	**(5.031.330.855)**	**32.968.669.144**
Selisih pembulatan				1	1
Laba rugi tahun berjalan	-	-	-	569.050.296	569.050.296
					-
Saldo per 31 Desember 2020	**-**	**-**	**-**	**(4.462.280.559)**	**33.537.719.441**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN ARUS KAS
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba Neto	569.050.296	(462.592.316)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	123.520.009	240.667.196
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk :		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	(47.000.000)	(57.500.000)
Kredit	1.329.027.567	2.243.773.674
Amortisasi		
Provisi	(55.199.896)	54.841.296
Aset Tak Berwujud	2.362.500	2.787.750
PERUBAHAN ASET DAN KEWAJIBAN OPERASI		
Penempatan Pada Bank Lain	(6.989.039.540)	6.745.362.245
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	202.958.726	39.637.368
Kredit Yang Diberikan	(259.569.296)	(7.081.256.358)
Restrukturisasi Kredit	(19.690.368)	148.155.812
Agunan Yang Diambil Alih	(820.000.000)	-
Aset Lain-lain	301.956.871	285.630.267
Kewajiban Segera Dibayar	548.731.611	(319.735.775)
Utang Bunga	42.297.823	7.824.447
Simpanan		
Tabungan	42.691.391	1.185.768.811
Deposito Berjangka	2.554.307.787	1.700.501.250
Simpanan dari Bank Lain	2.500.000.000	(4.500.000.000)
Kewajiban Imbalan Kerja	841.240	(157.375)
Kewajiban Lain-lain	4.113.481	(72.074.606)
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	**31.360.200**	**161.633.686**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/ penjualan Aset Tetap dan inventaris	(87.128.000)	(84.093.000)
Pembelian/ penjualan Aset Tidak Berwujud	(2.835.000)	3.276.114
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(89.963.000)**	**(80.816.886)**
ARUS KAS DARI PENDANAAN		
Selisih pembulatan	-	-
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**-**	**-**
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS	**(58.602.800)**	**80.816.800**
KAS AWAL PERIODE	**904.796.700**	**823.979.900**
KAS AKHIR PERIODE	**846.193.900**	**904.796.700**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi Perseroan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2020 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2019 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, PT BPR Palembang mengacu pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) PA BPR di Indonesia sebagai basis penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan oleh perseroan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar :

- Dasar akrual *(accrual basis)* , kecuali tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing dicatat atas dasar kas basis.
- Biaya historis *(historical cost)* , kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, penyertaan saham tertentu yang dicatat berdasarkan metode ekuitas dan surat-surat berharga tertentu yang dinilai berdasarkan nilai pasar serta aset yang menurut standar akuntansi harus dilakukan penilaian uang.

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari harga yang dibebankan. Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang biasanya terjadi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya
- Transaksi antara entitas dengan entitas lain dimana kedua entitas tersebut dibawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu
- Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang bukan ditanggung oleh entitas pelapor

c. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain.
Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*) dan mata uang emas.

d. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar *(perfoming)* yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

e. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum.

1. Giro pada bank umum
   Merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Tabungan pada bank lain
   Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
3. Deposito pada bank lain
   Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan *deposit on call. Deposit on call* adalah deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
4. Sertifikat deposito
   merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.
5. Penempatan pada bank syariah
   merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah.

f. Kredit Yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

f. Kredit Yang Diberikan (*Lanjutan*)

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Pokok kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debet).

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan apabila tidak terdapat penyaluran kredit.

Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

g. Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan

Kredit :
Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.

Penghapusbukuan Kredit *(Hapus Buku)* adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur.
Penghapusan Hak Tagih Kredit *(Hapus Tagih)* adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan

Penempatan pada bank lain :
Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas tabungan atau deposito tersebut disajikan sebagai pengurang *(offsetting account)* dari tabungan atau deposito tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian).

h. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

i. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.
Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan *(cost)* dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus *(straight-line method)* sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomisnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

i. Aset Tetap dan Inventaris (*Lanjutan*)

Pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba/rugi yang terjadi dibukukan sebagai pendapatan atau biaya pada periode bersangkutan.

j. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada).

k. Aset Lain - Lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca

l. Kewajiban Segera

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

m. Utang Bunga

Utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dll.

Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

n. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

o. Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

1. Tabungan dari bank lain
   Tabungan disajikan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

o. Simpanan Dari Bank Lain (*Lanjutan*)

2. Deposito dari bank lain
   - Deposito disajikan sebesar jumlah nominalnya atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.
   - Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga

p. Kewajiban Imbalan Kerja

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja.am pos tersendiri. Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan.
Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

q. Kewajiban Lain - Lain

Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan.
Termasuk dalam Kewajiban Lain-lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

r. Modal

1. Modal Disetor
   - Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas.
   - Modal disetor dicatat berdasarkan:
     a) Jumlah uang yang diterima.
     b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
     c) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
     d) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
     e) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.
        Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor aset non-kas.
   - Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.
2. Tambahan Modal Disetor (*Agio Saham)*
   - Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non- kas.
   - Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat:
     a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima;
     b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

r. Modal (*Lanjutan*)

3. Modal Sumbangan
   - Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non-kas dari pemilik.
   - Modal sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.
   - Sumbangan berupa aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas)

Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Dana setoran modal yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku direklasifikasi dari kewajiban (DSM – Kewajiban) ke ekuitas (DSM – Ekuitas) sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi adalah selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

s. Saldo laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Saldo laba dikelompokkan menjadi:

1. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
2. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal, dan
3. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
   - laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
   - laba rugi periode berjalan

t. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (biaya transaksi).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

t. Pendapatan Operasional (*Lanjutan*)

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.
Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

u. Beban Operasional

Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR
Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

v. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non-operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

w. Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

x Taksiran Pajak penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Kas

	2020	2019
Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut ini:		
- Kas Dalam Khasanah	846.193.900	904.796.700
Saldo Kas	**846.193.900**	**904.796.700**

3.2 Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima per 31 Desember masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima		
- Pend. Bunga Kredit PNS	138.532.717	573.438.167
- Pend. Bunga Kredit Pedagang/Umum	29.250.960	68.588.247
- Pend. Bunga Kredit Multiguna	309.445.696	94.482.083
- Pend. Bunga Kredit Investasi	114.052.664	180.581.781
- Pend. Bunga Kredit KPR Umum	52.279.123	17.702.671
- Pend. Bunga Kredit Inst Gas	-	2.076.095
- Pend. Bunga Deposito Bank	57.296.043	74.727.093
- Pend Bng Krd Pasar Wong Kito	1.389.000	-
- Pend Bng Krd Pnsgapok	12.024.482	-
- Pend Bng Krd Pnstukin	253.172.773	-
- Pend Bng Krd Pnshonorer	14.012.429	-
- Pend Bng Krd Chann Sert Diknas	1.541.392	-
- Pend Bga Ditangguhkanpedagang	(1.200.993)	-
- Pend Bga Ditangguhkan Kmg	(146.608.427)	-
- Pend Bga Ditangguhkankpr Umum	(26.550.448)	-
Saldo Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	**808.637.411**	**1.011.596.137**

3.3 Penempatan pada Bank Lain

	2020	2019
Penempatan pada Bank Lain per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci berikut ini:		
Giro Pada Bank Lain terdiri dari:		
- PT Bank Sumsel Babel, 1403059452	1.080.623.652	1.328.461.640
- PT Bank Sumsel Atmo, 1506103794	4.000.000	4.240.000
- PT Bank Muamalat, 3650002306	9.559.178	9.739.178
- PT Bank Permata Syariah, 971210222	824.095.335	373.068.353
- PT Bank Mandiri, 113-00-1106107-8	693.054.484	508.686.380
- PT Bank Syariah Mandiri, 7105206725	6.573.008	7.918.100
- PT Bank Jawa Barat & Banten, 0084764019001	102.979.480	102.465.974
- Giro Bank Maspion Cab.Palembang	2.516.426.653	-
Saldo Giro	5.237.311.791	2.334.579.626

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.3 Penempatan pada Bank Lain (*Lanjutan*)

Tabungan Pada Bank Lain:		
- Tabungan Optima Permata Bank S	9.054.181	-
- Tabungan Jtrust Bank	1.539.364.389	-
- Tabungan Bank Maspion	501.436	-
- Tabungan Baturaja	37.387.370	-
Saldo Tabungan	1.586.307.376	-
Deposito Pada Bank Lain terdiri dari:		
- PT Bank Sumsel Babel	3.000.000.000	-
- PT BPR Sumsel	-	3.000.000.000
- PT BPR Baturaja	5.900.000.000	5.900.000.000
- PT BPR Serang	1.500.000.000	3.500.000.000
- PT BPR Gerbang Serasan	2.500.000.000	500.000.000
- PT BPR Agritrans Batumarta	3.000.000.000	3.000.000.000
- Deposito Bpr Jorong Kampung Ta	500.000.000	-
- Deposito Bpr Utomo Manunggal S	2.000.000.000	-
Saldo Deposito	18.400.000.000	15.900.000.000
Saldo Penempatan Pada Bank Lain	**25.223.619.166**	**18.234.579.626**
Atas penempatan pada Bank Lain ini dibentuk cadangan Penyisihan Kerugian sebesar	-	(47.000.000)

Adapun rincian pembentukan penyisihan penempatan pada bank lain adalah :

Saldo Awal tahun	47.000.000	104.500.000
Pembentukan PPAP Tahun Berjalan	75.937.193	85.000.000
Penyisihan (pemulihan) beban PPAP	(122.937.193)	(142.500.000)
Saldo akhir	-	47.000.000

3.4 Kredit yang Diberikan

	2020	**2019**
Kredit Yang Diberikan Kepada pihak III terdiri dari:		
- Kredit PNS	9.266.104.445	26.822.243.832
- Kredit Perdagangan Umum	1.656.322.694	2.675.717.862
- Kredit Multiguna	11.912.508.558	9.557.123.256
- Kredit Rekening Koran	3.823.753.214	4.643.753.214
- Kredit Investasi	5.352.235.460	6.447.301.173
- Kredit Pasar Wong Kito	4.462.500.000	
- Kredit Program	48.333.332	8.407.350.000
- Kredit KPR Umum	1.331.210.869	1.448.411.021
Saldo dipindahkan	***37.852.968.571***	***60.001.900.357***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.4 Kredit yang Diberikan (*Lanjutan*)

Saldo pindahan	***37.852.968.571***	***60.001.900.357***
- Kredit Inst Gas	-	70.833.498
- Kredit Pns Gapok	1.319.946.625	-
- Kredit Pns Tukin	20.035.937.863	-
- Kredit Pns Honorer	1.069.349.550	-
- Kredit Channel Sertif Diknas	54.100.543	-
Saldo	**60.332.303.151**	**60.072.733.855**

Kredit Yang Diberikan berdasarkan kolektabilitas terdiri dari:

- Lancar	38.570.822.040	38.604.241.947
- Dalam Perhatian Khusus	10.477.779.172	10.587.800.922
- Kurang Lancar	1.166.198.680	1.806.916.161
- Diragukan	1.741.071.831	680.593.395
- Macet	8.376.431.429	8.393.181.430
Saldo	**60.332.303.151**	**60.072.733.855**

Kredit Yang Diberikan-Provisi dan Administrasi terdiri dari:

- Kredit -Provisi	378.256.455	433.456.351
- Restrukturisasi Kredit	128.465.443	148.155.812
Saldo	506.721.898	581.612.163

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sejumlah tersebut di atas terdiri dari:

- PPAP Kredit Yang diberikan	4.277.279.310	2.948.251.744
Saldo Kredit Neto	**55.548.301.943**	**56.542.869.949**

Adapun rincian pembentukan penyisihan kredit yang diberikan adalah :

Saldo Awal tahun	2.948.251.744	704.478.070
Pembentukan PPAP Tahun Berjalan	1.600.108.722	3.241.948.246
Penyisihan (pemulihan) beban PPAP	(271.081.156)	(998.174.572)
Saldo akhir	4.277.279.310	2.948.251.744

Managemen berpendapat bahwa jumlah penyisishan penghapusan kredit yang telah dibukukan adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

3.5 Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci berikut ini:	**2020**	**2019**
Agunan Yang Diambil Alih	2.720.000.000	1.900.000.000
Saldo Agunan Yang Diambil Alih	2.720.000.000	1.900.000.000

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.6 Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah
Rincian dari aset tetap dan inventaris adalah berikut ini:

Keterangan	31 Des 2019 Rp.	Penambahan Rp.	Pengurangan Rp.	31 Des 2020 Rp.
Harga Perolehan				
Kendaraan	15.830.000	-	15.830.000	-
Peralatan dan Perlengkapa	890.397.370	37.900.000	-	928.297.370
Komputer	319.076.220	65.058.000	-	384.134.220
Jumlah Hrg Perolehan	**1.225.303.590**	**102.958.000**	**15.830.000**	**1.312.431.590**
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	8.244.800	-	8.244.800	-
Peralatan dan Perlengkapa	596.038.941	87.756.219	-	683.795.160
Komputer	242.098.762	44.008.589	-	286.107.351
Jumlah Akumulasi	**846.382.503**	**131.764.809**	**8.244.800**	**969.902.511**
Nilai buku Aset dan Inve	**378.921.087**	**-**	**-**	**342.529.079**

Keterangan	31 Des 2018 Rp.	Penambahan Rp.	Pengurangan Rp.	31 Des 2019 Rp.
Harga Perolehan				
Kendaraan	15.830.000	-	-	15.830.000
Peralatan dan Perlengkapa	845.050.370	45.347.000	-	890.397.370
Komputer	280.330.220	38.746.000	-	319.076.220
Jumlah Hrg Perolehan	**1.141.210.590**	**84.093.000**	**-**	**1.225.303.590**
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	4.946.880	3.297.920	-	8.244.800
Peralatan dan Perlengkapa	431.667.533	164.371.408	-	596.038.941
Komputer	169.100.893	72.997.869	-	242.098.762
Jumlah Akumulasi	**605.715.306**	**240.667.196**	**-**	**846.382.503**
Nilai buku Aset dan Inve	**535.495.284**	**-**	**-**	**378.921.087**

3.7 Aset Tidak Berwujud

	2020	2019
Saldo Aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
- Aset Tak Berwujud	19.505.000	16.670.000
- Amortisasi Aktiva Tidak Berwuj	(16.613.304)	(14.250.804)
Saldo Aset Tidak Berwujud	**2.891.696**	**2.419.196**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:	2020	2019
Biaya Dibayar Dimuka		
- BDD-Asuransi Kas	300.500	601.000
- BDD-Sewa Gedung Kantor	567.875.000	892.375.000
- Bdd Promosi Kantor	0,02	-
- Bddpersonalia	30.000.000	
Persediaan		
- Persediaan Alat Tulis Kantor	5.126.773	10.778.574
- Persed. Barang Cetakan	24.442.900	24.525.500
- Persediaan Materai Tempel	486.000	
- Tagihan Pihak Ketiga	55.967.397	57.875.367
Saldo Aset Lain-Lain	**684.198.570**	**986.155.441**

3.7 Perjanjian Kontrak-Sewa Bangunan-Ruko-Kantor yang telah dilakukan PT BPR Palembang dengan Nyonya Khoe Siu Lie, Erlin pada tanggal 11 Agustus 2017 yaitu 2 (dua) pintu bangunan toko (ruko) beertingkat 3 (tiga) lantai yang terbuat dari batu dan beton, dilengkapi dengan fasilitas langganan listrik dan 1 (satu) bidang tanah kosong, ke-2 (dua) ruko tersebut serta 1 (satu) bidang Perjanjian Kontrak-Sewa ini diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022.

Harga Kontrak-Sewa selama perjanjian 5 (lima) tahun sebesar Rp 1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pajak atas sewa ditanggung oleh Nyonya Khoe Siu Lie, Erlin, jumlah tersebut telah dibayar lunas sesuai kwitansi dan telah dipotong disetorkan pajak atas Kotrak-Sewa tersebut sebesarRp 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu

3.9 Kewajiban Segera

Kewajiban Segera per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri	2020	2019
Kewajiban Segera Kepada Pemerintah		
- KS. Pot.PPH 21 Gaji	14.408.371	10.072.561
- KS. Pot. PPH Pasal 4 ayat 2 Bunga Deposito	42.976.484	36.837.281
- KS. Pot.PPH 23	326.015	898.678
Kewajiban Segera Kepada Pihak Lain		
- Premi BPJS Ketenagakerjaan	16.467.879	11.185.301
- Premi BPJS Kesehatan	6.116.785	5.388.061
- Cadangan Tunjangan THR	325.674.322	319.187.351
- Dana Purnajabatan Dekom	158.588.750	3.396.250
- Dana Purnajabatan Direksi	192.596.875	7.639.583
- Cadangan Cuti Tahunan	70.267.946	152.391.517
- Titipan Notaris	650.000	150.000
- Titipan Lainnya	21.582.472	-
Saldo dipindahkan	***849.655.900***	***547.146.584***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.9 Kewajiban Segera (*Lanjutan*)

Saldo pindahan	***849.655.900***	***547.146.584***
- Cadangan Pendidikan dan Pelatihan SDM	94.973.838	2.139.184
- Titipan Subsidi KRD Program	-	42.480.000
- Titipan Asuransi Kredit Program	41.730	5.850
- Titipan Angsuran Kredit Program	1.250.000	-
- Premi Asuransi Jaminan Kredit	351.350	200.000
- KYSD-Lainnya	205.620.458	11.190.046
Saldo Kewajiban Segera	**1.151.893.276**	**603.161.664**

3.10 Utang Bunga

	2020	2019
Utang Bunga per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
Bunga Tabungan		
- Tabungan Pasar Perdana Perorangan	18.870.611	18.679.405
- Tabungan Pasar Perdana Non Perorangan	3.981.706	3.268.652
Bunga Deposito YMHD		
- Bunga Deposito 1 bulan YMHD	21.311.123	46.604.668
- Bunga Deposito 3 bulan YMHD	13.316.365	12.509.004
- Bunga Deposito 6 bulan YMHD	35.609.571	17.811.135
- Bunga Deposito 12 bulan YMHD	20.107.850	16.891.000
Bunga Deposito Jatuh Tempo		
- Utang Bunga Deposito Jatuh Tempo	51.555.694	10.602.193
Bunga Deposito ABP		
- Bunga Deposito ABP 1 bulan YMHD	5.465.753	5.465.753
- Bunga Deposito ABP 3 bulan YMHD	6.293.151	3.210.959
- Bunga Deposito ABP 6 bulan YMHD	43.589.041	42.760.274
Saldo Utang Bunga	**220.100.867**	**177.803.044**

3.11 Simpanan

Simpanan per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:	2020	2019
- Tabungan		
- Tabungan Pasar Perdana	5.254.287.182	5.370.871.549
- Tabungan Pasar Perdana Non Perorangan	1.227.571.480	1.068.295.722
- Tabungan Pelajar Palembang	20.000	20.000
Jumlah Simpanan Tabungan	6.481.878.662	6.439.187.271
- Deposito Berjangka		
- Deposito 1 bulan	6.544.482.691	11.300.575.696
- Deposito 3 bulan	3.031.000.000	2.732.413.689
- Deposito 6 bulan	13.840.122.000	5.449.307.519
- Deposito 12 bulan	5.953.500.000	7.332.500.000
Jumlah Simpanan Deposito Berjangka	29.369.104.691	26.814.796.904
Saldo Simpanan	**35.850.983.353**	**33.253.984.175**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.12 Simpanan dari Bank Lain

Simpanan Dari Bank Lain per 31 Desember 2020 dan 2019	2020	2019
- Deposito		
- PT BPR Multi Dana Mandiri	500.000.000	500.000.000
- PT BPR Multi Dana Mandiri	500.000.000	500.000.000
- PT BPR Multi Dana Mandiri	800.000.000	800.000.000
- PT BPR Multi Dana Mandiri	200.000.000	200.000.000
- PT BPR Mitra Central Dana	500.000.000	500.000.000
- PT BPR Mitra Central Dana	400.000.000	400.000.000
- PT BPR Sumatera Selatan	2.000.000.000	2.000.000.000
- PT BPR Sumatera Selatan	-	3.000.000.000
- PT BPR Catur Mas	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Prima Dana Abadi	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Musi Artha Surya	1.500.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Bintang Dana Persada	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Sukasada	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Sukasada	1.000.000.000	-
- PT BPR Tri Gunung Selatan	1.000.000.000	-
- PT BPR Tri Gunung Selatan	1.000.000.000	-
- PT BPR Berkat Sejati	1.000.000.000	-
- PT BPR Berkat Sejati	1.000.000.000	-
Saldo Simpanan Dari Bank Lain	**15.400.000.000**	**12.900.000.000**

3.13 Kewajiban Imbalan Kerja

Saldo Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:	2020	2019
Kewajiban Imbalan Kerja	3.544.140	2.702.900
Saldo Kewajiban Imbalan Kerja	**3.544.140**	**2.702.900**

3.14 Kewajiban Lain-lain

Saldo Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:	2020	2019
Kewajiban Lain-lain		
- Setoran Angsuran Pinjaman Bendahara	12.130.688	8.017.207
Saldo Kewajiban Lain-lain	**12.130.688**	**8.017.207**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.15 Ekuitas	2020	2019
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
Modal		
- Modal Dasar	100.000.000.000	100.000.000.000
- Modal yang belum disetor	(62.000.000.000)	(62.000.000.000)
- Modal disetor	38.000.000.000	38.000.000.000
Saldo Laba		
- Laba/Rugi Tahun Lalu	(5.031.330.855)	(4.568.738.539)
- Laba/Rugi Tahun Berjalan	569.050.296	(462.592.316)
Saldo Ekuitas	**33.537.719.441**	**32.968.669.145**

3.16 Pendapatan Bunga	2020	2019
Pendapatan bunga periode Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan:		
Jasa Giro	281.107.637	78.529.166
Tabungan	40.250.180	-
Deposito	1.870.194.984	1.857.004.923
Jumlah	2.191.552.801	1.935.534.089
Pendapatan bunga kredit yang diberikan kepada pihak ketiga		
- Pend. Kredit PNS	3.830.481.532	4.754.758.796
- Pend. Krida Pedagang/Umum	389.898.557	461.959.681
- Pend. Kredit Multiguna	1.419.728.399	1.512.679.806
- Pend. Kredit Rekening Koran	-	167.664.165
- Pend. Bunga Kredit Investasi	907.582.299	1.005.586.585
- Pend. Bunga Kredit Program	878.130.000	1.390.455.000
- Pend Bng Krd Pasar Wong Kito	28.554.000	
- Pend. Bunga Kredit KPR Umum	191.185.939	40.930.579
- Pend. Bunga Kredit Insta Gas	6.903.391	6.305.855
- Pend Bng Krd Pnsgapok	105.702.397	-
- Pend Bng Krd Pnstukin	3.068.604.135	-
- Pend Bng Krd Pnshonorer	261.727.995	-
- Pend Bng Krd Chan Sert Diknas	14.359.009	-
- Pend Bng Krd Chan Tukin Pns	12.446.017	-
Jumlah	11.115.303.669	9.340.340.468
Jumlah pendapatan bunga kontraktual	**13.306.856.470**	**11.275.874.557**

Pendapatan provisi dan Aministrasi adalah berikut ini:		
Provisi		
- Pendapatan Bunga Provisi Kredit	464.969.896	380.447.736
Jumlah	464.969.896	380.447.736

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.16 Pendapatan Bunga (*Lanjutan*)

Administrasi		
- Pendapatan administrasi Kredit	417.307.000	432.353.647
Jumlah	417.307.000	432.353.647
Jumlah Pendapatan Provisi dan Administrasi	**882.276.896**	**812.801.383**
Biaya Transaksi	335.131.782	91.587.003
Jumlah	335.131.782	91.587.003

3.17 Pendapatan Operasional Lainnya

Rincian pendapatan operasional lainnya yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah berikut ini:

	2020	**2019**
Pendapatan operasional lainnya		
- Pend. Appraisal Agunan	7.500.000	22.890.000
- Pend. Administrasi Tabungan	168.703	50.492
- Pendapatan Fee Komisi/Discount Dll	22.044.448	5.224.609
- Fee Adm Transfer	1.371.000	1.230.500
- Pendapatan Penggantain Materai	1.944.000	10.265.000
- Pemulihan PPAP Kredit	394.018.349	142.500.000
- Pemulihan PPAP ABA	364.348.125	998.174.572
- Denda Break Deposito	94.966	182.321.231
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	**791.489.589**	**1.362.656.404**

3.18 Beban Bunga

Beban bunga untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci berikut ini:

	2020	**2019**
Beban Bunga Tabungan Pihak Ketiga Bukan Bank		
- Beban Bunga Tabungan Pasar Perdana	223.876.595	179.471.881
Beban Bunga Tabungan Pasar Perdana	48.891.019	37.622.042
Beban Bunga Deposito Pihak Ketiga Bukan Bank		
- Deposito 1 bulan	658.019.029	825.848.681
- Deposito 3 bulan	864.259.236	540.964.387
- Deposito 6 bulan	916.852.230	410.955.727
- Deposito 12 bulan	532.095.507	579.885.420
Beban Bunga Simpanan dari Bank		
Beban Bunga Deposito Bank Lain	1.357.353.424	1.671.897.259
Biaya Transaksi Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	41.320.478	35.352.055
Beban Bunga Lainnya		
- Beban Bunga Premi Penjaminan Simpanan (LPS)	124.993.420	92.209.084
Jumlah Beban Bunga	**4.767.660.938**	**4.374.206.535**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.19 Beban Penyisihan Kerugian	**2020**	**2019**
Beban penyisihan kerugian untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019; adalah berikut ini:		
- Penyisihan kerugian tabungan/deposito	75.937.193	85.000.000
- Penyisihan kerugian kredit	1.600.108.722	3.241.948.246
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	**1.676.045.916**	**3.326.948.246**

3.20 Beban Pemasaran	**2020**	**2019**
Beban pemasaran merupakan beban iklan dan promosi		
- Beban Promosi-Hadiah DPK	100.581.208	119.039.721
Jumlah Beban Pemasaran	**100.581.208**	**119.039.721**

3.21 Beban Administrasi Umum	**2020**	**2019**
Beban Administrasi Umum, utk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci berikut ini :		
- Beban tenaga kerja untuk periode yang berakhir tanggal per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
- Beban Gaji Pokok Direksi dan Karyawan	1.994.112.246	1.389.636.181
- Tunjangan Hari Raya	371.464.447	599.964.011
- Tunjangan Komunikasi Direksi	57.000.000	28.532.258
- Tunjangan Makan & Transport Karyawan	277.875.000	203.616.910
- Tunjangan Perumahan Direksi	57.000.000	28.532.258
- Tunjangan Kabag	118.850.000	43.000.000
- Tunjangan Fasilitas Kesehatan	-	15.960.000
- Tunjangan Cuti Tahunan	141.466.933	218.019.819
- Tunjangan Purnajabatan Dekom	-	40.755.000
- Tunjangan Purnajabatan Direksi	395.088.546	51.880.208
- Tunjangan Jabatan Komisaris	-	163.020.000
- Tunjangan Komunikasi Karyawan	2.200.000	18.782.609
- Tunjangan Teller	150.000	1.800.000
- Tunjangan Kosmetik	300.000	4.350.000
- Tunjangan Jabatan Direksi	407.550.000	204.005.645
- Tunjangan Transportasi Kabag	-	700.000
- Tunjangan Khusus	-	1.000.000
- Tunjangan BBM	-	44.388.957
- TunjanganService Motor	1.750.000	17.504.230
- Tunjangan Head Teller	400.000	4.800.000
- Fasilitas Kendaraan	171.000.000	183.636.774
- Tunjangan Keahlian	600.000	4.400.000
- Honorarium Bulanan Dewan Komisaris	747.621.996	163.020.000
Saldo dipindahkan	***4.744.429.168***	***3.431.304.860***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.21 Beban Administrasi Umum (*Lanjutan*)

Saldo pindahan	***4.744.429.168***	***3.431.304.860***
Tenaga Kerja Lainnya		
- Uang Lembur	71.721.114	47.957.937
- Biaya BPJS Ketenagakerjaan	112.976.284	84.746.447
- Biaya BPJS Kesehatan	52.377.332	42.971.894
- Biaya Perjalanan Dinas	17.117.179	77.938.072
- Biaya Tunjangan PPh Pasal 21 Direksi	139.090.057	69.466.212
- Biaya Tunjangan PPh Pasal 21 Komisaris	7.017.894	2.783.294
- Biaya Tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan	-	22.002.000
- Premi Asuransi Kesehatan Direksi	58.000.000	30.000.000
- Jasa Pengamanan/Outsorching	277.389.028	237.446.504
- Imbalan Pasca Kerja	75.017.067	32.905.125
- Biaya Rekrutmen	76.850.900	32.998.435
Jumlah Beban Tenaga Kerja	5.631.986.023	4.112.520.779
- Beban Pendidikan		
- Beban Pendidikan/ Pelatihan	162.787.280	211.290.408
Jumlah Beban Pendidikan	162.787.280	211.290.408
- Beban sewa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
- Beban Sewa Kendaraan	100.404.000	100.038.715
- Beban Sewa Gedung Kantor	324.500.000	324.500.000
- Beban Sewa Aplikasi CBS	150.150.000	118.791.200
- Beban Sewa TV Berlangganan	899.001	595.000
Jumlah Beban Sewa	575.953.001	543.924.915
- Beban Penyusutan		
- Beban Penyusutan Kendaraan	-	3.297.920
- Beban Penyusutan Peralatan Kantor	87.756.219	164.371.408
- Beban Penyusutan Komputer	44.008.589	72.997.869
- Amortisasi Instalasi&Lisensi Aplikasi	-	6.111.114
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.362.500	2.787.750
Jumlah Beban Penyusutan	134.127.309	249.566.060
- Beban Premi Asuransi		
- Premi Asuransi Uang Tunai	3.906.500	3.606.000
- Premi Asuransi Kendaraan	-	366.013
- Premi Asuransi Kerugian	-	779.373
Jumlah Beban Premi Asuransi	3.906.500	4.751.386

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.21 Beban Administrasi Umum (*Lanjutan*)

- Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

Beban Barang dan Jasa		
- Alat-alat Tulis, Kertas dan Am	59.311.251	68.222.667
- Barang Cetakan	40.795.100	77.702.100
- Pengiriman Dokumen, Surat dan	2.516.000	1.370.800
- Materai, Perangko, Benda Pos	6.191.000	12.588.000
- Rekening Listrik	106.765.779	95.790.014
- Rekening Air (PDAM)	10.024.180	13.286.560
- Rekening Telepon, Facximile DA	22.278.359	34.829.076
- Administrasi Bank	2.595.000	2.583.000
- Konsumsi/Makanan Karyawan/Pengurus	6.966.000	25.014.030
- Seragam Karyawan/Pengurus	63.979.090	1.080.000
- Baterai, Tinta, Stempel	3.949.000	2.867.000
- Gula, Kopi, The, Kue, Air Mineral	20.835.700	24.135.350
- Toilettries (Tissue, Pengharum)	15.479.100	15.958.802
- Perlengkapan Kantor	45.861.982	22.339.377
- BBM Genset	3.829.973	9.510.853
- Bensin/Solar	52.886.045	76.216.484
- Parkir	3.147.000	2.929.000
- Alat Lisrik	6.868.500	7.090.890
- Biaya Buku Bilyet	105.000	(16.000)
- Biaya Transfer, Kliring, RTGS	3.106.500	983.500
- Literatur, Majalah dan Koran	3.240.000	3.470.000
- Biaya Jasa Akuntan Publik	44.800.000	19.500.000
- Biaya Fotocopy, Laminating, Jilid	17.123.790	12.036.270
- Biaya Appraisal agunan	1.926.100	10.874.000
- Beban Notaris	19.000.000	6.500.000
- Beban Rapat	26.439.800	33.457.342
- Biaya Jasa Hukum	74.355.500	98.000.000
- Pengganti	46.100.000	-
- Pengganti Kosmetik	5.100.000	-
- Pengganti Bbm	51.586.000	-
- Pengganti Service	64.400.000	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	831.561.749	678.319.115

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.21 Beban Administrasi Umum (*Lanjutan*)

- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
- Beban Pemeliharaan Gedung Kantor	30.244.050	28.259.917
- Beban Pemeliharaan Kendaraan Kantor	9.750.640	7.843.800
- Beban Pemeliharaan Inventaris	18.214.000	13.725.150
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan AYDA	2.105.000	460.000
Jumlah Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	60.313.690	50.288.867
- Pajak-Pajak non PPh		
- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	7.249.799	7.249.799
Jumlah Beban Pajak Non Pph	7.249.799	7.249.799
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	**7.407.885.351**	**5.857.911.329**

3.22 Beban Operasional Lainnya.

Beban operasional lainnya untuk periode yang Berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	2020	2019
- Biaya Perizinan	300.000	500.000
- Fotocopy,Laminating,Jilid	329.800	-
- Jamuan Makan/Perjalan Tamu	7.483.480	13.367.500
- Biaya Lelang Agunan	-	5.550.000
- Sumbangan Lainnya	500.000	2.750.000
- Biaya Retribusi Kantor	3.410.000	1.705.000
- Biaya Konsumsi Rapat	270.000	100.000
- Operasional Lainnya	79.392.244	400.000
- Operasional Insentif Pemasaran	-	28.580.705
- Biaya Appraisal Agunan	5.000.000	20.640.000
- Biaya Aktivitas Karyawan	3.425.000	18.843.150
- Biaya Entertaintment	8.850.991	4.117.500
Jumlah Beban Operasional Lainnya	**108.961.515**	**96.553.855**

3.23 Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional untuk periode yg berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pendapatan Non Operasional		
- Kelebihan Kas	10.248	40.035
Pendapatan Non Operasional Lainnya	20.544.603	956
- Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	-	12.167.000
- Lainnya	9.600.000	11.185.353
Jumlah Pendapatan Non Operasional	**30.154.850**	**23.393.344**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.24 Beban Non Operasional

	2020	2019
Beban Non Operasional untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sejumlah		
- Iuran Perbarindo	-	12.000.000
- Biaya Tahunan OJK	-	34.269.666
- Lainnya	37.875.601	24.801.648
- Penjualan / Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris	7.585.200	-
Jumlah Beban Non Operasional	**45.460.801**	**71.071.314**

3.25 Taksiran pajak penghasilan

	2020	2019
Taksiran pajak penghasilan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar:	-	-

Taksiran pajak tersebut setelah koreksi audit yaitu sebagai berikut:

Pendapatan Bruto :		2020
Bunga Kontraktual		13.306.856.470
Provisi dan Administrasi		882.276.896
Biaya Transaksi		(335.131.782)
Pendapatan Operasional Lainnya		791.489.589
Pendapatan Bruto	**a**	**14.645.491.174**
Laba Komersial		**569.050.296**
Koreksi Fiskal Positif:		
Tunjangan Purnajabatan Direksi		395.088.546
Biaya Tunjangan Pph Pasal 21 D		139.090.057
Biaya Tunjangan Pph Pasal 21 K		7.017.894
Imbalan Pasca Kerja		75.017.067
Biaya Pemeliharaan Gedung Kant		30.244.050
Biaya Pemeliharaan Kendaraan K		9.750.640
Biaya Pemeliharaan Inventaris		18.214.000
Beban Promosi		100.581.208
Gula, Kopi, The, Kue, Air Mine		20.835.700
Pengganti Service Kendaraan		64.400.000
Jamuan Makan/Perjalanan Tamu		7.483.480
Sumbangan Lainnya		500.000
Biaya Retribusi Kantor		3.410.000
Biaya Konsumsi Rapat		270.000
Biaya Aktivitas Karyawan		3.425.000
Biaya Entertainment		8.850.991
Lainnya		37.875.601
Saldo dipindahkan		***922.054.234***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.25 Taksiran pajak penghasilan (*Lanjutan*)

Saldo pindahan		***922.054.234***
Koreksi Fiskal Negatif:		
Pemulihan PPAP		-
Laba Fiskal	**b**	**1.491.104.530**
Kompensasi Kerugian Pajak		
Laba (Rugi) Tahun Lalu	**(5.031.330.855)**	**(1.491.104.530)**
Sisa Kompensasi Kerugian	**(3.540.226.325)**	
Laba Fiskal Setelah Kompensasi		**-**
Taksiran pajak		
Laba Fasilitas yang dikenakan tarif 22%* 50%		-
Laba Fasilitas yang tidak dikenakan fasilitas dikenakan tarif 22%		
Taksrian Pajak Penghasilan		**-**
PPh Yang Telah Dibayar PPh 25 s/d November		-
Utang Pajak Badan Di Bulan Desember		**-**
PPh Yang Telah Dibayar PPh 25 Desember		-
PPh Kurang (Lebih) Bayar PPh 29/25		**-**

Dalam menghitung kewajiban perpajakan tahun 2020 Perusahaan yaitu Self Assesment System yaitu menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri oleh staff Akuntansi Perusahaan.

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak perusahaan dan tidak tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan saldo utang pajak tahun 2020 tersebut.

PT BPR Palembang tidak memperhitungakan Taksrian pajak dikarenakan perushaaan masih mengalami kerugian, sehingga PPh pasal 25 Nihil setiap bulannya.

3.25 Rekening Administratif	**2020**	**2019**
Rekening Administratif per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:		
Komitmen		
- Fas. Kredit pd Nasabah yang Belum Ditarik	426.246.786	426.246.786
- Penerusan kredit (*channelling*)	2.499.982	2.499.982
Kontinjensi		
- Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	2.999.953.969	2.170.539.880

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.26 Informasi Kredit kepada pihak Terkait adalah :

No	No. Rekening	Hubungan	Baki Debit
1	00000174	Keluarga Pengurus BPR Palembar	55.824.127
2	00000006	Pengurus BPR Palembang	6.962.197
3	00000384	Pengurus Pemegang Saham	181.664.620
4	00001913	Pejabat Eksekutif	91.243.727
5	00003428	Pengurus Pemegang Saham	200.895.758
6	00007589	Pejabat Eksekutif	75.753.228
7	00007639	Pejabat Eksekutif	79.961.750
8	00008475	Keluarga Pemegang Saham	740.748.930
9	00008879	Pejabat Eksekutif	61.120.773
10	00008894	Pengurus BPR Palembang	21.433.378
11	00008966	Pejabat Eksekutif	128.139.200
12	00010001	Pengurus Pemegang Saham	250.000.000
Total			**1.893.747.688**

-

3.27 Informasi Simpanan tabungan pihak Terkait adalah :

No	No. Rekening	Hubungan	Nominal
1	0010100003	Pengurus Pemegang Saham	16.324.329
2	0010100004	Pengurus Pemegang Saham	1.471.909
3	0010100005	Pengurus Pemegang Saham / Peng	130.983.485
4	0010100010	Pengurus BPR Palembang	3.219.391
5	0010100013	Pejabat Eksekutif	45.744
6	0010100014	Pengurus BPR Palembang	530.967
7	0010100024	Pejabat Eksekutif	57.442
8	0010100026	Pejabat Eksekutif	4.264.810
9	0010100038	Pejabat Eksekutif	1.004.459
10	0010100041	Pejabat Eksekutif	1.028.236
11	0010100060	Keluarga Pengurus BPR Palembar	52.460.715
12	0010100097	Pemegang Saham	17.802.729
13	0010100098	Pemegang Saham	342.663.115
14	0010100099	Pemegang Saham	362.589
15	0010100303	Keluarga Pengurus BPR Palembar	75.483
16	0010101794	Keluarga Pejabat Eksekutif	18.473
17	0010102359	Pejabat Eksekutif	532.914
18	0010104149	Pejabat Eksekutif	51.203
19	0010105111	Keluarga Pejabat Eksekutif	5.009.966
20	0010105137	Keluarga Pejabat Eksekutif	17.190
21	0010105285	Keluarga Pejabat Eksekutif	17.190
Saldo dipindahkan			***577.942.339***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.27 Informasi Simpanan tabungan pihak Terkait adalah :

Saldo pindahan			***577.942.339***
22	0010116147	Pengurus Pemegang Saham	18.926.149
23	0010116431	Keluarga Pengurus BPR Palembar	168.107
24	0010116503	Keluarga Pengurus BPR Palembar	36.278.362
25	0010116643	Keluarga Pengurus BPR Palembar	93.104
26	0010126681	Keluarga Pejabat Eksekutif	20.393
27	0010126690	Keluarga Pejabat Eksekutif	112.302
28	0010134455	Pejabat Eksekutif	1.217.607
29	0010137861	Keluarga Pejabat Eksekutif	3.231.510
30	0010143888	Keluarga Pejabat Eksekutif	14.268.863
31	0010200001	Pemegang Saham	140.715.672
32	0010200016	Group Usaha Pemegang Saham	441.677.588
33	0010200024	Group Usaha Pemegang Saham	33.031.948
34	0010200100	Pemegang Saham	36.428.171
35	0010200101	Pemegang Saham	21.165.083
36	0100173434	Pengurus BPR Palembang	30.048.179
37	0010174791	Keluarga Pemegang Saham	6.041.526
38	0010176841	Keluarga Pengurus BPR Palembar	4.783.500
39	0010178878	Pejabat Eksekutif	50.394
Total			**1.366.200.797**

3.28 Informasi Simpanan Deposito pihak Terkait adalah :

No	No. Bilyet	Hubungan	Nominal
1	0000117	Pemegang Saham	150.000.000
2	0000182	Keluarga Pengurus BPR Palembar	1.000.000
3	0000330	Keluarga Pengurus BPR Palembar	150.000.000
4	0000434	Keluarga Pejabat Eksekutif	500.000.000
5	0000437	Pengurus BPR Palembang	25.000.000
6	0000447	Keluarga Pejabat Eksekutif	500.000.000
7	0000458	Pengurus BPR Palembang	5.000.000
8	0000489	Pemegang Saham	500.000.000
9	0000531	Keluarga Pemegang Saham	400.000.000
10	0000564	Pejabat Eksekutif	50.100.000
Total			**2.281.100.000**

-

5. PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. Pendirian Perusahaan

PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat selanjutnya disebut PT BPR Pasar didirikan dengan Akte Nomor : 14 tanggal 08 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang, berkedudukan di Palembang dan Akte pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-28879AH.01.01 Tanggal 29 Mei 2013.

PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat telah mengalami beberapakali Perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris No. 03 tanggal 05 Desember 2016 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0023438.AH.01.02 tanggal 07 Desember 2016.

Berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 05 Oktober 2017 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat telah mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0021188.AH.01.02 tanggal 12 Oktober 2017.

b. Tempat dan Kedudukan

Jl. R. Sukamto No. 2 C-D, Rt.042 Rw. 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang 30114, Sumatera Selatan, Indonesia.
No. Telepon (0711) 5630071/5630092.
Website : bankbprpalembang.com
Email : bprpalembang@bankbprpalembang.com

c. Perijinan Usaha

Dalam melaksanakan usahanya, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang memiliki perijinan sebagai berikut :

- Surat Izin Prinsip Bank Indonesia tanggal 26 Maret 2013 dengan Nomor 15/83/DKBU.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang dengan nomor 060616408814 tertanggal 6 Januari 2016, masa berlaku hingga 6 Januari 2021.
- Surat Izin Gangguan No: 503/IG.R/7451/BPM-PTSP/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 07 Desember 2015.
- Nomor Pokok Wajib Pajak dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dengan Nomor NPWP: 02.298.251.4-301.000.
- Izin Usaha dari Otoritas Jasa keuangan NOMOR KEP-85/d.03/2015
- Izin Perubahan Nama BPR dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-56/KR.07/2017

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA (*LANJUTAN*)

d. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan mendirikan perusahaan ini adalah berusaha dibidang Bank Perkreditan Rakyat dengan melaksanakan kegiatan usaha :

- Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan,
- Memberikan kredit pinjaman
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan pada bank Lain.

f. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkuler Para Pemegang Saham PT BPR Palembang No. 34 tanggal 21 Oktober 2019 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang susunan pengurus PT BPR Palembang adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama Tn. Drs. H. Abdul Wahid Syukur
- Komisaris Tn. Sumirin T. Tjinto

Direksi :
- Direktur Utama Tn. Syafril, S.Sos
- Direktur Tn. Slamet, S.E.

Sampai pada akhir pemeriksaan, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang memiliki karyawan berjumlah 47 sudah termasuk karyawan kontrak dan status percobaan.

g. Modal

PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah mengalami beberapakali Perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris No. 01 tanggal 01 November 2018 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang yaitu Modal Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang terbagi dalam 1.000.000 (satu juta saham) lebar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan lima milyar rupiah) dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kepemilikan sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Perlembar Saham	Persentase	Jumlah Nominal
1.	Pemkot Palembang	260.000	100.000	68,42%	26.000.000.000
2.	PT SPPJ*	119.400	100.000	31,42%	11.940.000.000
3.	Tn. Ir. Ahmad S.	600	100.000	0,16%	60.000.000
	Total	**380.000**		**100%**	**38.000.000.000**

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA (*LANJUTAN*)

g. Modal (*Lanjutan*)

PT Bank Perkreditan Rakyat Pelembang telah mengalami beberapa kali Perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris No. 07 tanggal 11 Mei 2020 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang yaitu Modal Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang terbagi dalam 1.000.000 (satu juta saham) lebar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). sehingga kepemilikan saham berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Perlembar Saham	Persentase	Jumlah Nominal
1.	Pemkot Palembang	260.000	100.000	68,42%	26.000.000.000
2.	PT SPPJ	120.000	100.000	31,58%	12.000.000.000
	Total	**380.000**		**100%**	**38.000.000.000**

h. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi bertanggungjawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 26 April 2021

LAMPIRAN

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
Per 31 Desember 2020

KETERANGAN	Kredit	Penempatan pd Bank Lain	Jumlah 2020	Jumlah 2019
1. AKTIVA PRODUKTIF				
- Lancar	38.570.822.040	25.223.619.166	63.794.441.206	54.504.241.947
- Dalam Perhatian Khusus	10.477.779.172		10.477.779.172	10.587.800.922
- Kurang lancar	1.166.198.680		1.166.198.680	1.806.916.161
- Diragukan	1.741.071.831		1.741.071.831	680.593.395
- Macet	8.376.431.429		8.376.431.429	8.393.181.430
JUMLAH	60.332.303.151	25.223.619.166	85.555.922.318	75.972.733.855
2. AKTIVA PRODUKTIF YG DIKLASIFIKASIKAN				
- Kurang Lancar (50%)	583.099.340		583.099.340	903.458.080
- Diragukan (75%)	1.305.803.873		1.305.803.873	510.445.047
- Macet (100%)	8.376.431.429		8.376.431.429	8.393.181.430
JUMLAH	10.265.334.642		10.265.334.642	9.807.084.557
3. AGUNAN YANG DIPERHITUNGKAN				
- Lancar	-		-	55.663.582
- Dalam Perhatian Khusus	8.083.740.191		8.083.740.191	15.169.916
- Kurang lancar	425.281.443		425.281.443	895.000.000
- Diragukan	102.318.428		102.318.428	-
- Macet	5.016.560.933		5.016.560.933	6.758.246.000
JUMLAH	13.627.900.996		5.544.160.804	7.724.079.498
4. PPAPWD				
(setelah diperhitungkan agunan)				
- Lancar (0,5%)	-	-	-	239.742.892
- Dalam Perhatian Khusus (1%)	23.940.390		23.940.390	52.863.155
- Kurang lancar (10%)	74.091.724		74.091.724	103.127.929
- Diragukan (50%)	819.376.701		819.376.701	340.296.698
- Macet (100%)	3.359.870.496		3.359.870.496	2.259.221.070
JUMLAH	4.277.279.310		4.277.279.310	2.995.251.744
RASIO - RASIO	Aktiva Produktif Yg Diklasifikasikan		12,00%	12,91%
	Aktiva Produktif			
	Penyisihan Penghapusan Aktiva		100,00%	100,00%
	PPAP Yg Wajib Dibentuk			
	NPL Bruto		11.283.701.940	10.880.690.986
	Rasio NPL Bruto		18,70%	18,11%
	NPL Netto		7.030.363.019	8.178.045.289
	Rasio NPL Netto		11,65%	13,61%
PPAP Yang dibentuk BPR			4.277.279.310	2.995.251.744
PPAP YANG (KURANG) LEBIH BENTUK			0	0

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)
Per 31 Desember 2020

KETERANGAN	Nominal	Bobot Resiko	ATMR 2020	ATMR 2019
1. Kas	846.193.900	0%	-	-
2. Sertifikat BankIndonesia (SBI)		0%		
3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet.	1.689.500.000	0%	-	-
4.Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	1.900.000.000	0%	-	-
5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.		15%	-	
6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	25.223.619.166	20%	5.044.723.833	3.646.915.925
7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.		20%	-	-
8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.		20%	-	-
9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	13.756.355.949	30%	4.126.906.785	4.944.170.347
10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%.		50%	-	-
11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan.	1.896.467.658	50%	948.233.829	1.084.308.097
12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.		50%	-	-
13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil.	3.009.083.332	70%	2.106.358.332	5.517.983.554
14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	465.772.648	70%	326.040.854	304.243.120
15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	30.631.970.238	100%	30.631.970.238	23.475.715.990
16.Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	8.376.431.429	100%	8.376.431.429	8.378.224.833
17. Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.	345.420.775	100%	345.420.775	381.340.283
18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	820.000.000	100%	820.000.000	-
19. Aset lainnya selain tersebut diatas.	1.492.835.981	100%	1.492.835.981	1.997.751.578
Jumlah ATMR	**90.453.651.075**		**54.218.922.055**	**49.730.653.727**

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
PERMODALAN (CAR)
Per 31 Desember 2020

KETERANGAN			NOMINAL	NOMINAL
I	MODAL		2020	2019
	1	Modal Inti		
		1.1. Modal Disetor	38.000.000.000	38.000.000.000
		1.2. Modal Sumbangan		
		1.3. Dana Setoran Modal		
		1.4. Cadangan Umum	-	-
		1.5. Cadangan Tujuan	-	-
		1.6. Laba Ditahan		
		1.7. Laba Tahun-tahun Lalu	-	-
		1.8. Rugi Tahun-tahun Lalu	(5.031.330.855)	(4.568.738.539)
		1.9. Laba Tahun Berjalan Setelah Dikurangi Kekurangan PPAP (max 50% Setelah THP)	284.525.148	-
		1.10. Rugi Tahun Berjalan	-	(462.592.316)
		Sub Total Modal Inti	33.253.194.293	32.968.669.145
		1.11. Goodwill	-	-
		1.12. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejakpengambilalihan	(1.425.000.000)	(950.000.000)
		1.12. Kekurangan PPAP	0	(0)
		Jumlah Modal Inti	31.828.194.293	32.018.669.145
	2	Modal Pelengkap		
		2.1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap		
		2.2. PPAP umum (maks 1,25% dari ATMR)	-	292.606.047
		2.3. Modal Kuasi/Modal Pinjaman		
		2.4. Pinjaman Subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)		
		Jumlah Modal Pelengkap	-	292.606.047
		2.5. Jumlah Modal Pelengkap yg Diperhitungkan (maks. 100% dari modal inti)		
	3	Jumlah Modal	31.828.194.293	32.311.275.192
II	MODAL MINIMUM (12% x ATMR)		6.506.270.647	5.967.678.447
III	KELEBIHAN ATAU (KEKURANGAN) MODAL		25.321.923.647	26.050.990.698
IV	**RASIO MODAL (CAR=Modal / ATMR x 100%)**		**58,70%**	**64,97%**

BMPK:

Pihak Terkait (10% * Modal)	3.182.819.429	3.231.127.519
Pihak Tidak Terkait (20% * Modal)	6.365.638.859	6.462.255.038

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
RASIO KREDIT TERHADAP DANA DITERIMA
Per 31 Desember 2020

KETERANGAN			SALDO 2020	SALDO 2019
1	Simpanan Pihak ke 3			
	a	Tabungan	6.481.878.662	6.439.187.271
	b	Simpanan Berjangka (Deposito)	29.369.104.691	26.814.796.904
2	Pinjaman diterima bukan dari Bank > 3 bln		-	-
3	Deposito dan Pinjaman diterima dari bank lebih dari 3 bln		11.900.000.000	10.900.000.000
4	Modal Pinjaman			
5	Modal Inti		31.828.194.293	32.018.669.145
	Jumlah dana yang diterima		79.579.177.647	76.172.653.321
6	Aktiva Produktif (selain ABA)			
	a	Kredit yg diberikan	60.332.303.151	60.072.733.855
	b	Kredit yg Diberikan kpd Bank Lain		
	c	Lainnya		
	Jumlah Aktiva Produktif		60.332.303.151	60.072.733.855
LDR (Aktiva Produktif / Dana yg Diterima)			**75,81%**	**78,86%**

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
LIKUIDITAS (CASH RATIO)
Per 31 Desember 2020

KETERANGAN	SALDO 2020	SALDO 2019
1. Alat Likuid		
a. Kas	846.193.900	904.796.700
b. Antar Bank Aktiva		
- Giro	5.237.311.791	2.334.579.626
- Tabungan	1.586.307.376	-
- dikurangi Tabungan ABP	-	-
Jumlah Alat Likuid	7.669.813.066	3.239.376.326
2. Utang Lancar		
a. Kewajiban Segera Dibayar	1.151.893.276	603.161.664
b. Utang Bunga	220.100.867	177.803.044
c. Simpanan Pihak ke 3		
- Tabungan	6.481.878.662	6.439.187.271
- Deposito Berjangka	29.369.104.691	26.814.796.904
Jumlah Hutang Lancar	37.222.977.496	34.034.948.884
CASH RATIO	**20,61%**	**9,52%**

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
ROA dan BOPO
Per 31 Desember 2020

BULAN	TOTAL ASET 2020	TOTAL ASET 2019
JANUARI	94.327.751.033	81.156.381.136
PEBRUARI	93.428.836.153	85.196.442.692
MARET	95.942.172.275	82.193.315.827
APRIL	94.271.337.704	83.386.651.034
MEI	91.222.616.496	82.632.166.238
JUNI	95.358.431.949	82.414.769.907
JULI	97.145.633.803	94.141.077.252
AGUSTUS	96.878.408.549	88.172.010.329
SEPTEMBER	94.132.173.291	87.590.593.013
OKTOBER	90.158.919.656	87.989.197.926
NOPEMBER	88.969.463.103	79.772.660.364
DESEMBER	86.176.371.765	79.914.338.136
TOTAL	1.118.012.115.777	1.014.559.603.853
Rata2 Aset	93.167.676.315	84.546.633.654
ROA	**0,61%**	**-0,55%**
Biaya Operasional	14.061.134.927	13.774.659.686
Pendapatan Operasional	14.645.491.174	13.359.745.340
BOPO	**96,01%**	**103,11%**